



MINGGU IV FEBRUARI 2024

• TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 •

info indonesia

HARGA, @ Rp 20.000,-

PEMILU ULANG RAKYAT SENANG BANSOS DIPERPANJANG



PECAH
SUARA DPR
GULIRKAN
HAK
ANGKET

PPP
TINGGALKAN
PDIP SIAP
GABUNG
PRABOWO-
GIBRAN

HAK
ANGKET
BERUJUNG
PEMILU
ULANG

ANIES
KALAH DI
PILPRES
BALIK
LAGI KE
JAKARTA

KESENJANGAN
SOSIAL
JADI
TANTANGAN
AHMED ZAKI

PRABOWO-
GIBRAN
MENANG
GERINDRA
DIKALAHKAN
GOLKAR

MASYARAKAT
SULSEL INGIN
SOSOK
PEMIMPIN
MERAKYAT

“Proses penghitungan suara pilpres masih berlangsung. Tidak patut seorang presiden yang menjabat sudah membas program dari pasangan calon mendatang, mendahului lembaga yang resmi berwenang menyampaikan hasil pilpres”

Bernard Allvitro



Uji Nyali

Pergulatan politik terkait hasil Pemilu 2024 masih terus berlanjut. Isu kecurangan masih terus dihembuskan Capres 01 dan 03 karena mereka tidak yakin Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran. Dalam pandangan mereka tanpa ada campur tangan penyelenggara Pemilu dan pemerintah mustahil Prabowo - Gibran akan menang satu putaran saja.

Bahkan kecurangan-kecurangan mulai terkuak hingga akhirnya berujung pada pengajuan Hak Angket untuk mengungkapkan berbagai kejanggalan di Pemilu 2024. Bukan itu saja, upaya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo juga semakin deras dilontarkan.

Hak Angket terus digulirkan para partai pendukung sebagai bentuk perlawanan terhadap kecurangan di Pemilu 2024. PDI Perjuangan yang menjadi motor penggunaan Hak Angket mulai mendapat dukungan dari Partai Nasdem, PKB dan PKS.

Meski demikian banyak juga yang meragukan Hak Angket ini akan berlangsung di parlemen karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih mengambil posisi jalur aman. Mereka berpendapat Hak Angket bukanlah penyelesaian akhir untuk mengungkapkan kecurangan di Pemilu 2024 namun malah bisa menimbulkan perpecahan antara partai politik dan bangsa Indonesia sendiri.

Pemerintah dan partai pendukungnya juga sepertinya tidak tinggal diam untuk mengambil langkah antisipasi. Lobi-lobi politik terus dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengundang Surya Paloh dan elit partai lainnya untuk menggelar pertemuan.

Manuver politik ini dianggap cukup efektif hingga banyak yang menilai kalau pengajuan Hak Angket hanya sebuah gertak sambal saja. Nyali elit partai akan diuji apakah mereka punya kekuatan untuk melakukan perlawanan di parlemen atau lebih memilih zona nyaman.

Tidak bisa dipungkiri semua elit partai saat ini masih dalam kendali Joko Widodo selaku Presiden Indonesia. Upaya pemakzulan Jokowi juga masih dipertanyakan kekuatannya karena butuh energi yang besar untuk melakukan hal tersebut.

Di sisi lain, partai pendukung pasangan Prabowo - Gibran juga tentu tidak tinggal diam. Mereka juga terus melakukan berbagai upaya pengamanan agar keberlangsungan Prabowo - Gibran bisa berlanjut dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI selanjutnya.

Lepasnya PPP dari koalisi PDIP dan tidak menutup kemungkinan akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran membuat kekuatan partai pengusung Hak Angket sedikit kehilangan kekuatan.

Bukan hanya PPP saja yang kemungkinan akan bergabung dengan koalisi Prabowo - Gibran. PKB dan Partai Nasdem juga bisa saja berpaling karena semua kemungkinan itu bisa terjadi dalam politik.

Di sisi lain banyak beranggapan PDIP harus berani keluar dari zona nyaman dengan menjadi oposisi di parlemen. Sikap oposisi bukan hal baru bagi PDI Perjuangan sehingga ada kemungkinan untuk mengulanginya.

Demikian juga dengan PKS yang disarankan untuk bersikap oposisi. Bila dua partai ini punya sikap sama maka demokrasi Indonesia berjalan lebih baik. Sejauh ini pengawasan pada pemerintah sangat lemah karena semua partai dikuasai.

Di tengah kenaikan sembako saat ini rakyat cuma berharap agar demokrasi Indonesia bisa menyejahterakan bukan menyengsarakan.●





“Kalau lawannya dapat yang seimbang, katakanlah pak Anies maju lagi, ataupun misalnya PDIP mengusung Bu Risma, tentu pertarungan akan sangat kompetitif”

Yusak Farhan

ANIES KALAH DI PILPRES BALIK LAGI KE JAKARTA

Calon presiden di Pilpres 2024, Anies Baswedan, bisa saja maju kembali sebagai calon gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Anies diketahui kalah dalam Pilpres 2024 berdasarkan hasil hitung cepat dan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“**N**ama-nama seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai capres gagal, memungkinkan juga diperhitungkan (menjadi cagub DKI),” kata pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, Minggu, 25 Februari 2024.

Menurut dia, apabila benar Anies dan Ganjar mau maju dalam Pilgub DKI, maka keduanya harus legawa turun level politik. Turun kelas dari capres menjadi cagub.

“Sekadar ambisi kekuasaan, tak terpilih di capres menjadi cagub juga tak masalah,” kata dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten itu.

Anies dan Ganjar diketahui sama-sama pernah menduduki kursi gubernur. Anies menduduki kursi gubernur DKI Jakarta satu periode (2017–2022). Sedangkan Ganjar menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dua periode (2013–2023).

Pengamat politik, Arifki Chaniago, menyebut, Anies kemungkinan besar akan maju lagi dalam Pilgub DKI Jakarta. Anies masih populer dan masih punya jejak menjadi gubernur DKI selama satu periode lagi.

Menurut Arifki, PKS bisa saja mengusung Anies kembali sebagai cagub dalam Pilgub DKI yang akan digelar pada November 2024. “Pilihan menarik PKS apakah akan mengusung kembali Anies yang kalah di pilpres, tapi peluangnya cukup besar maju di Pilgub DKI,” ujarnya.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 2023 menunjukkan bahwa Anies menjadi salah satu top of mind sebagai cagub di kalangan pemilih Jakarta. Sebanyak 6 persen responden secara spontan menye-

but nama Anies ketika ditanyakan siapa cagub pilihan mereka.

Kendati begitu, lebih banyak responden, yakni 12,6 persen, menyebut nama mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selain itu, sebanyak 7,4 persen responden menyebut Ridwan Kamil, lalu 6,2 persen menyebut Sandiaga Uno, dan 4,4 persen menyebut Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

PKS sendiri belum menyampaikan soal rencana Pilgub DKI Jakarta 2024, termasuk adanya kemungkinan kembali mengusung Anies Baswedan. Kendati demikian, PKS mengaku berharap DKI memiliki gubernur seperti Anies nantinya.

“Kami apresiasi Pak Anies selama menjabat sebagai gubernur DKI saat diusung oleh PKS. Kami juga berharap DKI dapat mempunyai gubernur sebaik beliau ke depan,” kata Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz, Selasa, 27 Februari 2024.

Namun, Aziz menyampaikan saat ini pihaknya masih fokus pada hasil Pilpres dan Pileg 2024. Sehingga belum bisa fokus membahas soal Pilkada yang bakal berlangsung November 2024.

“Tapi saat ini kami sedang fokus untuk mengawal suara be-

liau (Anies Baswedan) untuk capres dan mengawal suara caleg-caleg PKS, baik di DPR maupun DPRD. Kami tidak ingin perhatian untuk hal ini terpecah karena kami memikirkan cagub,” jelasnya.

Aziz menyampaikan PKS masih optimistis bahwa Anies bakal memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Pihaknya meyakini Pilpres tidak hanya berjalan satu putaran.

“Insya Allah Pak Anies akan menang dan jadi Presiden RI di putaran kedua,” ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya pembahasan mengenai alternatif jika Anies tidak menang dalam Pilpres, semisal kembali mengusungnya di Pilgub, Aziz kembali menegaskan bahwa pihaknya belum membahasnya.

Kendati belum fokus Pilgub DKI, Aziz menyebut pihaknya terbuka untuk kemungkinan berbagai opsi mengenai langkah koalisi dengan parpol lain dalam mengusung gubernur nantinya.

“Semua opsi dan koalisi sangat mungkin dilakukan karena kursi PKS di DKI belum cukup untuk mencalonkan gubernur sendiri,” ujarnya.

Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farhan, memprediksi Pilgub DKI Jakarta 2024 akan diikuti tiga pasangan kandidat berkompeten untuk bersaing meraih suara terbanyak di Jakarta.

“Saya kira prediksi saya tetap ya sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nanti,” kata Yusak, Senin, 26 Februari 2024.

Yusak menjelaskan, meski baru terdengar tiga nama yang muncul ke publik, pertarungan

di Pilkada DKI diprediksi akan kompetitif mengingat kemampuan calon yang diusungkan.

“Kalau lawannya dapat yang seimbang, katakanlah pak Anies maju lagi, ataupun misalnya PDIP mengusung Bu Risma, tentu pertarungan akan sangat kompetitif,” jelasnya.

Yusak mengatakan, kemungkinan Anies bakal diusung PKS menjadi cagub di Pilkada DKI Jakarta sangat terbuka lebar. Sebab, popularitas Anies lebih tinggi dibanding kader PKS.

“Ya meskipun PKS kursinya cukup banyak, tapi kalau bicara internal PKS ini kan lagi-lagi problemnya popularitas dan elektabilitas,” kata Yusak.

Meski mencuat nama dari internal PKS seperti ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, kata Yusak, popularitas keduanya masih kalah jauh dari Anies Baswedan maupun nama-nama yang digadang maju dalam Pilkada semisal Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni.

“Pak Mardani Ali Sera ataupun Pak Hidayat Nur Wahid saya kira diadu dengan Ridwan Kamil ya masih jauhlah popularitas, elektabilitasnya. Sehingga PKS tidak mesti mencalonkan kadernya lagi kan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memprediksi Anies akan kembali maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

“Anies Baswedan berpeluang kembali ikuti kontestasi DKI Jakarta,” kata Dedi, Selasa, 27 Februari 2024.

Hanya saja, kata Dedi, Anies berisiko akan mendapat perlawanan seperti Pilpres. Apalagi, saat ini Presiden Joko Widodo masih menjabat pada saat Pilkada DKI Jakarta nantinya berlangsung.

“Meskipun bisa saja akan alami perlawanan serupa seperti Pilpres kemarin, terlebih Jokowi masih menjabat sebagai Presiden pada saat proses kontestasi berlangsung,” ujarnya.

Menurut Dedi, Anies bisa saja diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Partai pengusung Anies bisa saja tetap yakni PKS, bisa juga mendapat sokongan PKB dan NasDem,” ucapnya.

Dedi menuturkan, PKS dan NasDem memiliki tokoh potensial seperti Mardani Ali Sera dan Ahmad Sahroni. Namun, jika membaca elektabilitas, PKS, NasDem, dan PKB akan jauh lebih potensial menang jika mengusung Anies.

• RDO





PRABOWO-GIBRAN TAK PERLU TIM TRANSISI

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tercatat sebagai pemenang Pilpres 2024 versi hitung cepat. Berdasarkan data hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), keunggulan Prabowo-Gibran menyentuh angka 58,84 persen.

Jika pada akhirnya Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang pilpres dan menjadi presiden-wakil presiden 2024-2029, pasangan tidak perlu membentuk tim transisi seperti yang dilakukan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014. Tim ini menyiapkan transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi.

Saat itu, tim transisi diketuai oleh Rini Soemarno. Beberapa deputy tim transisi ketika itu adalah Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal. Selain itu, tim penasehatnya adalah Luhut Panjaitan, Hendropriyono, Hasyim Muzadi, dan Syafii Maarif.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan Prabowo Subianto bila sudah resmi menyandang status sebagai presiden terpilih, tidak memerlukan tim transisi. Menurut Dedi, Prabowo dan Presiden Jokowi sudah berada di dalam kubu yang sama. Apalagi Wakil Presiden pendamping Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

“Tim transisi tidak diperlukan jika memang Prabowo dinyatakan menang, hal ini mengingat Jokowi adalah bagian dari mentor kampanye dan kemenangan Prabowo, sekaligus keluar cawapres Gibran, artinya pemerintahan yang ada saat ini akan secara adaptif menyambung ke pemerintahan berikutnya,” kata Dedi.

Dedi melihat gagasan dan visi misi yang dibawa Prabowo selama masa kampanye lebih banyak mereplikasi gagasan pemerintahan Jokowi. Karena memang kata dia gagasan yang dibawa Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

“Terlebih, Prabowo juga tidak terlihat memiliki agenda fun-

damental dalam pemerintahannya selain mereplikasi gagasan dan kerja Jokowi,” ucap Dedi.

Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, juga mengatakan bila pasangan Prabowo-Gibran, resmi memenangkan Pilpres 2024, pemerintahan baru tidak membutuhkan Tim Transisi sebagaimana dulu dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014. Menurut Ray, visi misi Prabowo-Gibran adalah keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sementara yang melanjutkan adalah anak kandung Jokowi sendiri yakni Gibran.

“Kalau pilihan secara teoritik tidak perlu tim transisi. Apa yang mau ditransisikan, visi misinya sama karena Prabowo-Gibran ini kan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi,” kata Ray, Selasa, 27 Februari 2024.

Ray menilai pemerintahan baru Prabowo-Gibran sebenarnya lebih membutuhkan Tim Kerja atau Panitia Kerja yang tugasnya menyiapkan pemindahan kekuasaan. Namun Tim Kerja ini tidak perlu menyiapkan struktur atau visi baru lantaran visi misi yang diusung Prabowo-Gibran sama persis dengan yang dilakukan Jokowi lima tahun terakhir.

Tim Transisi yang dipahami Ray adalah bila presiden dan wakil presiden baru memiliki visi-misi dan program yang berbeda signifikan dari pemerintahan sebelumnya. Dan pemerintah-

han baru karena perbedaan visi dan misi, membutuhkan lembaga dan struktur baru untuk kelancaran perwujudan visi misinya tersebut.

“Nah, Prabowo-Gibran kan substansinya kan sama dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Apalagi yang melanjutkan adalah anak kandung Pak Jokowi juga yang relatif masih sama dengan Pak Jokowi,” ujar Ray.

Jika Prabowo-Gibran membentuk Tim Transisi, menurut Ray, justru publik akan melihat kalau ada persoalan internal. Artinya ada sesuatu yang cukup terjal di internal Prabowo-Gibran.

“Kalau yang dibentuk Tim Kerja berarti biasa-biasa saja. Tidak akan banyak berubah. Cukup disiapkan oleh Tim Kerja,” katanya.

Kalau memang ada masalah di internal Prabowo-Gibran, Ray menganalisa ada tiga kelompok di sana. “Kelompok Jokowi, Kelompok Golkar yang sekarang lagi naik daun, serta Kelompok Gerindra dan Prabowo,” ujar Ray.

Golkar naik daun karena perolehan suaranya di Pemilu 2024 berdasar hitung cepat berada di posisi kedua terbanyak. Selain itu, isu angket membuat posisi Golkar menjadi kuat. “Presiden butuh Golkar untuk menahan agar angket tidak berkelanjutan,” ungkapnya.

Kalau memang ada Tim Transisi, dia menyebut berarti ada upaya mempertemukan kepentingan tiga kelompok tersebut. Dia mencontohkan Golkar yang tidak bekerja begitu keras (saat kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin) saja mendapat 4 kursi kabinet. “Masak sekarang saja (Golkar) da-

pat empat, mungkin sekarang dapat tujuh, setidaknya enam kursi. Makanya kelihatannya ini ada tiga faksi,” ucapnya.

Ray bahkan menyebut bisa saja karena dari faksi-faksi ini juga menginginkan agar jatah untuk Jokowi jangan terlalu banyak. Apalagi Jokowi sudah mengatakan kalau dia adalah jembatan. Pernyataan ini dimaknai Ray bahwa siapa pun yang mau bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran harus lewat Jokowi.

“Ini bisa tidak diterima oleh dua kelompok lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, juga menilai tim transisi untuk menjembatani pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan berikutnya tidak lagi diperlukan dalam pergantian presiden kali ini.

Bahlil pun menilai tim transisi tak diperlukan sebab pemenang Pilpres 2024 akan melanjutkan program kerja Jokowi.

“Dalam pandangan saya kalau tim transisi itu kan kalau pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan yang terpilih, tapi kalau pemerintahan yang sekarang judulnya berkelanjutan, apanya yang mau ditransisi?” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Menurutnya, partai pendukung Prabowo-Gibran mayoritas sudah berada di Kabinet Indonesia Maju. “Kan, orang Pak Prabowo, timnya juga ada di kabinet, ngapain?” imbuhnya.

Bahlil menyebut yang perlu dibentuk adalah tim pemantapan untuk melanjutkan program-program Jokowi yang sudah dianggap baik. Serta untuk melengkapi visi dan misi Prabowo-Gibran.

Kendati KPU belum mengeluarkan keputusan final terkait pemenang Pilpres 2024, namun Bahlil menyebut mereka sudah meyakini paslon terpilih, sehingga pemerintah menurutnya juga harus mengantisipasi program prioritas paslon terpilih, termasuk makan siang dan susu gratis.

“Kita buat rencana saja, kita sambil nunggu hasil penetapan KPU. Ini hanya rancangan, simulasi saja, namanya simulasi, tahap awal, kan boleh-boleh saja,” ujar Bahlil. •RDO





“Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 (Maret) rencananya yang diperkirakan akan maju”

Ganjar Pranowo

INFO
PILPRES

Minggu IV • Februari 2024

5

SERIOUS KAWAL PERHITUNGAN SUARA

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, angkat suara soal masa depan politiknya dan apa yang akan dia lakukan ke depan usai Pilpres 2024. Ganjar mengaku saat ini hanya ingin fokus pada rencana jangka pendek mengawal hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia tak menjawab rencana jangka panjangnya jika hasil penghitungan KPU tetap memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

“Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 (Maret) rencananya yang diperkirakan akan maju,” Ganjar saat usai menghadiri acara relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024.

Ganjar mengaku masih mengantipasi segala sesuatu yang bisa saja terjadi hingga pengumuman resmi dari KPU. Dia mengaku ingin fokus pada tanggung jawab hingga semuanya tuntas.

“Yang diperkirakan akan maju dan kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun, kita mitigasi,” kata dia.

Namun, Ganjar mengingatkan kepada para pendukungnya untuk tetap menjaga persatuan dan tidak menyebarkan hoaks, serta menggunakan jalur konstitusional.

“Saya ingatkan mari kita jaga persatuan. Jangan nge-hoaks kita pakai jalur konstitusi ya,” kata dia.

Capres berambut putih itu meminta para relawan untuk menyampaikan

protes melalui cara-cara yang elegan dan didasari bukti-bukti sesuai fakta di lapangan. “Kalau ada yang mau protes, yang ingin menyampaikan kecurangan, sampaikan dengan cara yang baik-baik,” kata Ganjar.

Ganjar saat ini tengah mendorong dua partai pengusungnya di DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dia mengajak partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk mendorong hal yang sama. Namun, hak angket baru bisa diusulkan secara resmi pada awal Maret mendatang usai masa reses DPR. Jika digabungkan antara partai pengusung Ganjar dan AMIN, hak angket telah memenuhi lebih

dari setengah dari total kursi DPR.

Tiga partai pengusung Anies, NasDem, PKS, dan PKB juga telah menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Namun, mereka masih menunggu sikap resmi PDIP di DPR.

Ganjar menyebut usulan hak angket DPR yang disampaikannya merupakan keputusan dari PDIP dan hal itu melalui proses yang serius. Bahkan, kata Ganjar, usulan hak angket DPR telah disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan diketahui oleh Ketua DPR, Puan Maharani, yang juga kader partai banteng.

“Kami tidak pernah tidak serius ngajuin hak angket. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen yang berbicara, itu artinya sudah keputusan partai ya,” ujarnya.

Dia menuturkan, mengenai keseriusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengajukan hak angket sudah dibicarakan saat pertemuan koordinasi pasca pemungutan suara, pada 14 Februari 2024. Tak hanya itu, Ganjar juga menyayangkan terdapat sejumlah pihak yang salah menangkap pernyataan Mahfud MD selaku cawapres paslon 3 yang seolah-olah tidak mau ikut-ikutan atau mendukung pengajuan hak angket di DPR. Padahal, semua pihaknya telah satu suara.

“Ya sampai dengan 15 Februari, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kami kompak untuk hak angket,” tegas Ganjar.

Ganjar juga menanggapi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, yang menilai usulan hak angket sekadar gertak politik. Ganjar menegaskan usulan itu bukan sebuah gertakan.

“Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak,” kata dia.

Ganjar mengatakan ada banyak cara yang dapat dilakukan menyikapi polemik penyelenggaraan

pemilu. Dia menilai angket merupakan cara yang tepat.

“Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja dulu. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain,” ujarnya.

Ganjar menegaskan dirinya serius mengusulkan hak angket. Ganjar juga menyinggung jika penggunaan hak angket pernah dilakukan.

“Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling fair, jadi nggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.

Dia kemudian merespons partai kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang telah setuju dengan hak angket. Namun, Ganjar mengaku belum berkomunikasi secara formal dengan mereka.

“Saya belum berkomunikasi secara pribadi. Ya kalau saya sebenarnya simple aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu nya seperti ini,” kata dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kondisi pemilu di Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Terlebih, penggunaan Sirekap pun banyak diprotes.

“Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem,” ungkap dia.

Ganjar mengaku banyak menerima laporan terkait penggunaan Sirekap. Dia pun menilai seharusnya KPU dapat mengakui kesalahan jika memang penggunaan Sirekap banyak salah dalam membaca data.

“Nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300, dan dia masih kemudian menampung itu. Masa kaya gitu mau kita terima, yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya ‘ya kami salah’ itu paling fair,” tuturnya.

“Hari ini, seperti gitu nggak mau ngaku salah, bagaimana satu TPS lebih dari 300, itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja ngira sistem itu fail,” imbuh dia. •RDO





HAK ANGKET BERUJUNG PEMILU ULANG

Sejumlah pihak mendorong adanya hak angket yang akan diajukan partai politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertujuan menyoediki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyebut, Hak Angket tersebut bukan dalam konteks mengubah hasil Pemilu 2024.

“Kalau angket kepada presiden. Karena enggak mungkin DPR meng-angket Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena KPU itu lembaga independen, bukan eksekutif,” kata Ray, Minggu, 25 Februari 2024.

Sehingga satu jalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu bisa melalui jalan hak angket. Dalam hak angket, kata dia, akan diselediki dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo tentang penggunaan bantuan sosial dalam pelaksanaan pemilu.

“Benar enggak bahwa bansos yang dibagi-bagi oleh Presiden itu berhubungan dengan kenaikan elektabilitas salah satu pasangan calon. Nah, itu yang diangket,” tutur alumnus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Selain penggunaan bansos, kata Ray, hak angket itu pun akan menelusuri benar apa tidak keterlibatan ketidaknetralan aparat TNI-Polri, aparat sipil negara (ASN), serta aparat desa, dalam Pemilu 2024 ini. “Itu yang akan diangket karena itu wilayah eksekutif, wilayah politik,” tutur dia.

Menurut Ray, hak angket bisa berujung pada pembatalan proses pemilu yang baru berlangsung pada 14 Februari lalu. “Prosesnya bisa men-disclaimer hasil pemilu. Bisa saja berujung pada permintaan dilakukan pemilu ulang,” ucap Ray.

Dia menyebut, pemilu ulang itu bisa terjadi secara keseluruhan atau bisa juga setengah dari proses pemilu tersebut. Tergantung skala kerusakan pada pemilu itu. Baik itu bansos, hingga yang terberat adalah pemungutan dan penghitungan suara.

“Konsekuensinya harus diganti penyelenggara pemilu, bukan lagi KPU yang sekarang. Mungkin sifatnya berbadan ad hoc. Karena mereka kan sudah dianggap gagal, kan,” ujarnya.

Ray menjelaskan alasan perlu adanya hak angket diajukan oleh DPR. Menurut dia, di ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi, banyak lembaga mengalami degradasi.

Dia mencontohkan kasus di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usaman, bekas ketua MK. Selain itu, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, diputuskan tiga kali melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP).

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurut Ray, mulai sekarang. Juga muncul praktik dinasti politik yang naik kelas. Dinasti Politik yang biasanya terjadi dalam pemilihan kepala daerah, kini terjadi di pemilu nasional.

“Dan marak muncul praktik kriminalisasi. Jadi kalau kita mau benar-benar tidak kehilangan demokrasi, ini harus kita perbaiki,” tutur dia.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menilai rencana penggunaan hak angket sebagai proses politik di DPR harus dilihat secara positif dalam rangka penguatan sistem demokrasi yang berkualitas. Isu pengajuan hak angket sebagai buntut dugaan kecurangan pemilu meluas setelah diusulkan calon presiden Ganjar Pranowo.

Mantan Ketua MK dan Majelis Kehormatan MK itu mengatakan hanya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, hak angket DPR belum pernah digunakan. Menurut dia, hak angket selalu digunakan oleh DPR pada masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Hak angket oleh DPR mencerminkan berjalannya fungsi checks and balances antar cabang kekuasaan eksekutif vs legislatif sebagai perwujudan sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945,” ujar Jimly dalam keterangan tertulis, Minggu, 25 Februari 2024.

Selain wacana hak angket sebagai proses politik untuk pengusutan dugaan kecurangan pemilu, Jimly menilai proses hukum penyelesaian perkara harus pula dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyalurkan aspirasi ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pemilu.

Dia mengatakan proses hukum itu dapat melalui peradilan administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan PT-TUN, peradilan pidana pemilu di peradilan umum, dan peradilan hasil pemilu di MK.

Menurut Jimly, proses politik dan hukum ini bertujuan memindahkan ketidakpuasan dan kemarahan publik terhadap proses dan hasil pemilu, terutama hasil pilpres, melalui mekanisme yang resmi ke ruang-ruang sidang yang resmi di DPR, Bawaslu atau MK.

“Kedua proses politik dan hukum ini sama-sama penting,”

ujarnya.

Jimly pun mengimbau publik menyaksikan kedua proses itu dengan positif. Dia meyakini ketegangan dan luapan emosi publik pada waktunya akan reda. Mulai 1 dan 20 Oktober 2024, dia mengatakan pemilu akan menghasilkan pemerintahan baru yang dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

Dia percaya pemerintahan baru akan bekerja menurut konstitusi dan aturan hukum serta etika penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku. Dia juga meyakini akan ada dukungan fungsi pengawasan yang efektif dari parlemen dan fungsi peradilan yang terpercaya dari cabang kekuasaan kehakiman.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Dhia Al Uyun, menyebut Pemilu 2024 bisa berpotensi diulang. Sebab ada rentetan indikasi kecurangan mulai dari proses, pemungutan hingga penghitungan suara. Menurutnya, fenomena dugaan kecurangan ini telah diramalkan oleh film Dirty

Vote, terkhusus adanya peran birokrasi yang mempengaruhi suara hingga politisasi bantuan sosial (bansos).

“Di sisi lain terdapat surat suara tercablos di luar negeri, situasi di Sampang, beberapa KPPS yang meninggal dunia, hingga kemarin terdapat rilis dari Cyberity Foundation, tentang kerawanan Sirekap yang memungkinkan adanya perubahan hasil perhitungan suara. Apalagi servernya berada di RRC dengan kondisi yang tidak stabil, sangat mungkin disalahgunakan,” kata Dhia, Minggu, 18 Februari 2024.

Dia menilai peluang untuk dilakukan pemilu ulang bisa terjadi karena harus memperhatikan wilayah yang paling bermasalah.

“Iya (pemilu berpotensi diulang), namun harus memperhatikan wilayah mana yang bermasalah,” tutur Dhia.

Bahkan, kata Dhia, pemilu tak hanya bisa diulang, melainkan Presiden Jokowi bisa dimakzulkan bila ada bukti kuat yang menggambarkan kecurangan tersistematis. Pasalnya celah kecurangan itu terjadi akinkan ada masalah pada sistem.

“Perlu digarisbawahi yang bermasalah ini sistemnya, manakala bisa dibuktikan kesalahan ini tersistematis, maka bukan saja pemilu diulang, melainkan pemkazulan presiden tidak bisa dihindarkan,” ucapnya.

Di sisi lain, pengajar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menuturkan, ribuan TPS harus menggelar pencoblosan ulang yang harus bebas dari manipulasi.

“Bukan sekadar melakukan pemungutan suara ulang, tapi juga sosialisasinya juga harus bagus dan dipastikan tidak ada manipulasi,” kata Titi, Kamis, 22 Februari 2024.

Titi mengatakan Bawaslu juga harus mengetatkan prosedur dan mekanisme. Hal itu juga sudah dijelaskan di UU Pemilu.

“Ada hal-hal dalam undang-undang pemilu sudah diatur tegas yang bisa menyebabkan pemungutan suara ulang. Konsekuensi dari pelanggaran tata cara prosedur mekanisme yang bisa menyebabkan pemungutan suara ulang,” ujar Titi. ●RDO





“Kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk”

Billy David

Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025 PEMERINTAH MAKIN LANCANG

Program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 disebut turut dibahas Presiden Joko Widodo untuk dimasukkan dalam APBN pada rapat kabinet bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Presiden Jokowi siap melaksanakan program makan siang gratis, meskipun APBN 2025 diprediksi defisit 2,8 persen. Menurutnya, salah satu program unggulan dari Paslon 02 itu bisa dilaksanakan pada tahun depan.

Meskipun pemerintah telah memprediksi akan ada defisit APBN 2025 sekitar 2,4-2,8 persen, tetapi Airlangga menekankan bahwa program ini akan terus berlanjut meski pengeluaran negara akan lebih besar dari pendapatan.

“Jadi terkait program kami juga melihat (dari sisi) terkait defisit anggaran yang (diprediksi) mencapai 2,4—2,8 persen itu untuk program yang menjadi quick win presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, sehingga pos-posnya sudah bisa masuk,” kata Airlangga.

Dia menjelaskan, alasan program unggulan Prabowo-Gibran itu dibahas dalam sidang kabinet paripurna lantaran pemerintah dinilainya perlu mengkalkulasi besaran anggaran yang perlu untuk dipersiapkan di RAPBN 2025. Mengingat, pelaksanaan dari anggaran tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar.

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, nantinya pelaksanaan program makan siang gratis akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, program ini akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu, seperti kawasan dengan tingkat stunting yang tinggi.

Kemudian, Airlangga mengamini pemerintah sudah memegang data para calon penerima program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan berapa besaran anggaran yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan program ini karena masih dalam kajian.

“Alokasi masih terus kami bahas, tetapi kami kan sudah tahu bahwa misalnya ada ibu hamil itu sudah ada programnya sekarang, di Kementerian Kesehatan dan juga balita

yang 22,3 juta. Nah, kami sudah ketahui dari program tersebut untuk anak TK-SD kemudian TK itu jumlahnya jadi 7,7 juta, SD 28 juta termasuk MI dan SMP 12,5 juta dari angka itu kami bisa hitung anggarannya,” tuturnya.

Airlangga masih enggan untuk menjelaskan lebih mendetil terkait tahapan dan anggaran program makan siang ini nanti karena menurutnya masih dalam perhitungan. “(Rencana anggaran) sudah ada, tapi kita masih bahas prioritas (penerima), tidak ada kira-kira,” imbuhnya.

Presiden Jokowi sendiri membantah membahas spesifik terkait program makan siang dan susu gratis yang masuk APBN 2025. “Ndak ada, hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” katanya dalam acara Rapim TNI-Polri, Rabu, 28 Februari 2024.

Menurut Jokowi, hal tersebut dilakukan supaya presiden terpilih nantinya jadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran agar lagi mengajukan anggaran kepada DPR.

“Inilah yang disampaikan di rapat paripurna, tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan (makan siang gratis),” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, cawapres nomor urut 03, Mahfud MD, tak permasalahan program makan siang gratis dibahas dalam rapat kabinet Jokowi. Menurutnya, pembahasan bisa saja dilakukan untuk mengantisipasi apabila Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang.

“Ya ndak papa, mungkinantisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu. Kan tidak apa-apa juga, Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet,” kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Meski demikian, Mahfud menilai bahwa apabila program makan siang gratis masuk ke APBN 2025 adalah kurang tepat. Sebab, APBN 2025 disusun pemerintah sekarang, sementara makan siang gratis adalah program pemerintah baru.

“APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan-

kan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru. Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni 2025. Tetapi enggak apa-apa lah, itu mungkin hanya sumbangan saja,” katanya.

Saat ditanya apakah etis membahas program meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan resmi hasil Pemilu 2024, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini hanya menjawab singkat. “Terseher kamu saja. (Etis) ya kamu nilai sendiri saja,” tegasnya.

Peneliti Anggaran Publik dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Bernard Allvitro, menilai, pembahasan alokasi program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 terlalu terburu-buru dan “lancang” secara teknokratis. Semestinya program rezim baru dibahas dalam APBN Perubahan yang akan disusun setelah resmi menjabat, bukan disipkan masuk oleh pemerintah petahana sebelum penetapan resmi hasil pemilu keluar.

Bernard menilai, pembahasan rencana program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 terkesan sangat prematur. Lepas dari fakta bahwa Prabowo-Gibran saat ini memang unggul di sejumlah hasil hitung cepat, pengumuman resmi pemenang Pemilu 2024 belum keluar.

Menurut Bernard, pembahasan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran dalam RAPBN yang disusun pemerintahan Jokowi sebelum hasil definitif keluar itu semakin menguatkan keraguan soal netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.

“Proses penghitungan suara pilpres masih berlangsung. Tidak patut seorang presiden yang menjabat sudah membahas program dari pasangan calon mendatang, mendahului lembaga yang resmi berwenang menyampaikan hasil pilpres,” kata Bernard.

Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga mengkritik pemerintah yang membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran dalam sidang kabinet. Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David, menilai hal itu tak pantas dilakukan karena Pemilu 2024 belum selesai.

“Kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk. Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih dan proses legislasi untuk pembahasan program makan siang ini kan belum berjalan sama sekali,” kata Billy, Selasa, 27 Februari 2024.

Billy mengatakan pembahasan program ini di Kabinet justru akan membuat masyarakat semakin bingung. Terlebih, terdapat sejumlah masalah rakyat yang belum dituntaskan Pemerintah.

“Momen ini tentu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Kepentingan politis dan sekelompok elite mendahului problem rakyat Indonesia,” jelas dia.

Ia menyoroti permasalahan harga beras yang melonjak tinggi yang dinilai belum ada solusi nyata dari Pemerintah.

“Publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah-masalah yang saat ini sedang ada. Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum ada solusi konkretnya,” lanjutnya.

•RDO



"Pemilu tahun ini memang terberat sepanjang era reformasi, karena BERUANG; beras dan uang. Sabar ya, jaga terus suara rakyat sampai tuntas!"

Muhaimin Iskandar



PEMILU PALING BERAT SEJAK ERA REFORMASI

Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar, menyatakan Pemilu 2024 sebagai yang terberat selama masa reformasi.

Menurutnya, hal itu disebabkan oleh apa yang dia sebut sebagai "beruang", yaitu singkatan yang dia pakai untuk beras dan uang.

"Pemilu tahun ini memang terberat sepanjang era reformasi, karena BERUANG; beras dan uang. Sabar ya, jaga terus suara rakyat sampai tuntas!" kata Muhaimin melalui akun media sosial X, Selasa, 27 Februari 2024.

Dalam cuitan tersebut, Muhaimin tidak menjelaskan peran beras dan uang dalam Pemilu 2024. Namun, dalam gelaran Pilpres kali ini, banyak pihak menuding Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri menggunakan bantuan sosial atau bansos untuk mengarahkan dukungan ke calon tertentu.

Calon yang dimaksud mengarah kepada paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu bansos tersebut adalah bansos beras yang dibagikan pemerintah beberapa pekan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan tetap bersyukur dan berterima kasih kepada semua orang yang mendukung partainya. "Inshaallah amanatnya terus kita perjuangkan untuk terwujud," ucap Cak Imin.

Selain itu, Wakil Ketua DPR itu juga menyampaikan apresiasi kepada calon legislatif dan kader PKB. Khususnya, karena mereka telah melewati Pemilu 2024 dengan segala keterbatasan yang ada.

"Hormat cinta dan bangga kepada semua caleg PKB yang berjuang dengan semua keterbatasan logistik," ujar Cak Imin.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Cak Imin, lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei pasca-Pemilu 2024 yang menemukan bahwa 48,5 persen pemilihan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menilai Pemilu 2024 kurang jujur.

Dalam hal kepuasan terhadap penyelenggara Pemilu 2024, 59,2 persen pemilih

Anies-Cak Imin menyatakan puas, dan yang kurang puas 30,5 persen. Pemilih Prabowo-Gibran yang merasa puas sebesar 95,0 persen dan kurang puas 3,5 persen. Lalu, pemilih Ganjar-Mahfud yang merasa puas sebesar 73,2 persen dan kurang puas 26,2 persen.

Selanjutnya, 50,1 persen pemilih Anies-Cak Imin menyebut penyelenggaraan Pemilu 2024 jujur, dan 48,5 persen menyatakan kurang jujur. Lalu, 93,1 persen pemilih Prabowo-Gibran menyebut Pemilu 2024 jujur dan yang menyatakan kurang jujur hanya 3,3 persen. Sedangkan, 72 persen pemilih Ganjar-Mahfud menyatakan Pemilu 2024 jujur dan hanya 25,4 persen yang menyebut kurang jujur.

Selain itu, 18,6 persen pemilih sangat percaya Pemilu bebas intervensi pemerintah, 41,2 persen cukup percaya, 27,4 persen kurang percaya, 7,4 persen tidak percaya sama sekali, dan tidak tahu/tidak jawab 5,4 persen.

Tolak Kecurangan Pilpres

Sejumlah relawan dan pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar pertemuan untuk menyuarakan penolakan terhadap kecurangan di Pilpres 2024. Acara tersebut bertajuk 'Silaturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang' dan digelar di Gedung Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN), Penjernihan, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024.

Winston Herlanjaya, salah satu inisiator acara kegiatan Silaturahmi dan Dialog Relawan Pejuang AMIN (01) dan GAMA (03) mengeluarkan pernyataan sikap. Menurutnya, negara dalam keadaan me-

nyimpang dari arah dan tujuan demokrasi. Penyalahgunaan wewenang dari Presiden Jokowi telah menciderai kedaulatan rakyat Indonesia.

"Pemilu curang dan cara-cara KKN sudah merusak tatanan kebangsaan yang berkeadilan. Kami berkumpul mewakili jutaan pejuang Perubahan dari Calon Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN 01) dan Calon Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD (GAMA 03) mendeklarasikan perlawanan atas pemilu curang," ucap dia.

"Sikap kami kedepan jelas menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oleh oknum rezim berjamaah yang melibatkan penyelenggara Pemilu. Kemudian, menolak capres dari hasil KKN dan melanggar Konstitusi dan mendesak DPR untuk lakukan usulan diskualifikasi capres dan cawapres tersebut," tegasnya.

Sementara, Marlin Bato yang merupakan pejuang relawan Ganjar-Mahfud MD juga senada sikapnya. Pihaknya mendesak dengan segera kepada anggota DPR untuk melakukan hak Angket memanggil Presiden Jokowi untuk segera diperiksa.

"Demi kebaikan bangsa dan negara, kami perwakilan jutaan pendukung baik dari 01 dan 03 mendesak Dewan perwakilan Rakyat untuk melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi atas tindakannya tidak netral dalam pemilu 2024," ucap dia.

Simpul Relawan 03 dan Pejuang 01 juga bersepakat agar ada gerakan lebih besar mendorong agenda tersebut. Ke depan, membuat Forum Pejuang Rakyat (FPR) atau gerakan Rakyat menolak Pilpres Curang yang isinya para pejuang 01 dan 03 yang akan sama-sama melakukan gerakan aksi demonstrasi selama masa proses angket dan pemilu. Sehingga ke depan, lebih mudah bergerak dan menjawab tantangan atas kesulitan dan kebuntuan sistem demokrasi.

Organ Poros Buruh yang juga pendukung 01, Arief Minardi mendesak DPR untuk segera menggelar hak angket dan siap menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk perlawanan atas kecurangan Pilpres 2024.

Para pejuang 01 dan 03 juga mendesak kepada DPR untuk memanggil dan memeriksa semua komisioner KPU yang terlibat pada pemilu curang dan segera menentukan proses tahapan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan 01 dan 03. ●RDO





“Kekurangannya mereka mungkin masih kurang berpengalaman dan kurangnya jaringan. Namun hal itu bisa diatasi sehingga bukan masalah mendasar”

Arianto

BEDA CARA BEDA HASIL SUARA

Meski penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mencapai 72 persen namun nama-nama calon anggota DPR RI dari Sumatera Selatan sudah bisa diketahui siapa-siapa saja. Ada beberapa nama yang muncul di dua daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan. Dimana nama-nama itu sendiri bukan menjadi sebuah kejutan karena memang sudah diprediksi sebelumnya.

Dari perhitungan sementara baik di Dapil Sumatera Selatan 1 dan Sumsel 2, ada perubahan yang cukup signifikan. Para petahana DPR RI banyak tergusur dan diisi pendatang baru. Di sisi lain ada juga para caleg ini yang meraih suara cukup signifikan bahkan sudah dipastikan lolos ke Senayan.

Di Dapil Sumatera Selatan 1 ada Fauzi H Amro dari Partai Nasdem dengan perolehan suara sementara lebih dari 131 ribu. Kemudian ada Kahar Muzakir yang mendapat suara sementara 96 ribu lebih. Keduanya adalah petahana DPR RI.

Besarnya suara Fauzi H Amro juga menguntungkan suara partai dan bisa mendapat dua kursi dari Sumsel 1.

Sementara kembali terpilihnya Kahar Muzakir sebagai anggota DPR membuatnya menjadi anggota dewan terlama dari Sumatera Selatan. Ini menjadi periode kelima bagi Kahar Muzakir dan dianggap politisi penunggu Senayan yang abadi.

Di Dapil Sumatera Selatan 2, ada tiga calon yang meraih suara sementara cukup signifikan yakni Ahmad Wazir Noviadi dengan meraih 116 ribu lebih dari Partai Gerindra. Besarnya suara yang didapat putra Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya ini membuat Partai Gerindra mendulang dua kursi di Dapil Sumsel 2.

Sebaran suara yang diraih AW Noviadi ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan OKU Selatan.

Satu kursi lagi didapat oleh Sri Meliyana yang untuk sementara sudah mengemas 46 ribu suara lebih.

Partai Nasdem juga di-

pastikan mendapat dua kursi setelah dua calonnya mengemas suara yang sangat besar. Hj Samantha Tivani mengumpulkan suara sementara 110.357 lebih dan Irma Suryani yang telah mengemas diatas 102 ribu.

Samantha yang merupakan putri dari Gubernur Sumsel Herman Deru meraih suara terbesar kedua di Dapil Sumatera Selatan 2. Sebaran suara terbesarnya ada di wilayah Kabupaten OKU Timur, OKU Induk dan Kabupaten OKU Selatan serta Kota Prabumulih.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) Arianto, setiap Caleg baik petahana dan pendatang baru punya peluang yang sama. Namun dalam pencapaian hasil akhir tentu ada perbedaan.

Perbedaan itu antara lain terkait soal logistik pencalonan, cara pendekatan ke masyarakat, kekuatan jaringan dan sebaran politik yang dilakukan para Caleg.

“Soal pendekatan ke masyarakat misalnya, tidak bisa lagi menggunakan pola seperti anggota dewan. Berkunjung kemudian menyapa masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka setelah itu pergi tanpa meninggalkan apapun. Pola itu tidak masuk lagi bagi masyarakat,” terang Arianto.

Bahkan meski para Caleg itu tidur di rumah-rumah masyarakat, bukan menjadi jaminan bisa dipilih. Tanpa meninggalkan logistik, mustahil akan dicoblos karena

yang diingat masyarakat adalah sesuatu yang mereka terima.

Arianto mencontohkan AW Noviadi yang meraih suara cukup banyak di Pemilu 2024 ini. Selain kekuatan logistik yang besar jaringannya juga ikut bekerja keras dan turun ke lapangan dengan mendatangi masyarakat secara langsung.

“Pendekatannya seperti pola Pilkada. Timnya datang langsung ke masyarakat untuk mengenalkan Noviadi sekaligus sosialisasi. Selanjutnya yang bersangkutan juga ikut hadir mengetuk pintu rumah masyarakat. Mereka yang didatangi langsung tentu senang, tentu ada logistik yang mereka terima,” ujarnya.

Pola ini diterapkan saat bersosialisasi di OKU Selatan yang bukan basis utama Noviadi namun nyatanya bisa mendulang suara yang cukup signifikan.

Hal yang sama juga dilakukan Samantha Tivani. Kunjungan Gubernur Herman Deru ke daerah-daerah dimanfaatkan Samantha untuk bersosialisasi langsung dengan masyarakat sehingga mereka teringat langsung dengan yang bersangkutan.

Sementara sebagian petahana masih menggunakan pola pendekatan anggota dewan. Mereka hanya bertatap muka sebentar karena keterbatasan waktu serta tidak meninggalkan logistik apapun untuk mengingat kedatangan mereka ke masyarakat.

“Hal ini bisa dilihat dari Bobby Adhityo

Rizaldy, anggota DPR yang perolehan suaranya di urutan ketiga sementara. Bobby masih kurang banyak turun ke masyarakat karena kesibukannya sebagai anggota dewan. Sementara calon dari Partai Golkar punya waktu dan lebih banyak,” ucap Ian, sapaannya.

Sementara mereka yang punya jaringan dan mesin politik kuat bisa dilihat dari sosok Fauzi H Amro dan Kahar Muzakir. Fauzi Amro menggunakan perangkat RT untuk membantunya mendulang suara.

Kahar Muzakir punya jaringan politik yang kuat terbilang cukup sukses mendulang suara di setiap Pemilu. Nomor berapa pun dia ditempatkan selalu berhasil meraih suara untuk kursi DPR RI.

“Dia (Kahar Muzakir) sudah punya jaringan kuat dan terpelihara sehingga tidak sulit baginya untuk mendulang suara. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita melakukan pendekatan, memelihara jaringan serta punya logistik yang kuat. Itu saja,” terang Arianto.

Di Pemilu 2024 ini, wakil Sumsel di DPR RI banyak diisi orang-orang baru. Ada kelebihan dan kekurangan tentunya.

“Kekurangannya mereka mungkin masih kurang berpengalaman dan kurangnya jaringan. Namun hal itu bisa diatasi sehingga bukan masalah mendasar,” jelas Arianto.

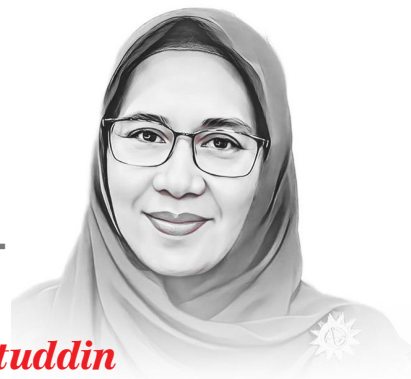
Sisi baiknya, para pendatang baru ini tentu punya motivasi tinggi untuk membuktikan kalau mereka layak duduk di kursi Senayan. Sebagai tokoh muda mereka juga akan lebih luwes dan komunikasi khususnya sesama kaum milenial.

“Mereka juga tidak terkontaminasi dengan permainan korupsi dan punya beban untuk mempertahankan jabatan di periode berikutnya. Saya kira cukup baiklah dengan wajah baru sekarang ini,” katanya. ●RDR



“Mereka terkadang tidak ada di lapangan tidak ikut sosialisasi tiba-tiba kata warga namanya ada dan bisa menang. Tentunya indikasi politik uang juga digunakan di sini”

Khalisah Hayatuddin



DINASTI POLITIK MENJALAR KE DAERAH

Dalam budaya politik Indonesia, dinasti politik bukanlah hal yang baru bahkan sudah ada sejak masa kerajaan dulu. Di era politik modern sistem politik tersebut kembali naik ke permukaan saat Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo diangkat sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subianto.

Praktik politik dinasti bukan hal baru bahkan telah banyak dilakukan kepala daerah di Indonesia. Anak gubernur menjadi bupati kemudian melanjutkan kekuasaan ayahnya sebagai kepala daerah provinsi.

Anggota DPRD mengikutsertakan anaknya di lain daerah pemilihan (Dapil) dan lainnya. Dinasti politik di Pemilu 2024 ini sangat terasa karena dibantu oleh kekuasaannya orangtua. Di Sumatera Selatan, sebagian besar anak kepala daerah sukses mendulang suara dan duduk di kursi legislatif.

Di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mantan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya terakhir menjabat pada 1 Oktober 2023 di masa Pemilu 2024 juga menerapkan praktik dinasti politik.

Herman Deru dengan nama besarnya sebagai mantan orang nomor satu di Sumsel memboyong keluarga besarnya di Pemilu 2024 agar lolos ke parlemen. Dua anaknya, Samantha Tivani dan Ratu Tenny Leriva sukses melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI dan anggota DPD RI mewakili Sumatera Selatan.

Keduanya meraih suara cukup besar yakni diatas 100 ribu sehingga sudah dipastikan lolos ke Senayan.

Demikian juga menantunya Muhammad Yaser yang diprediksi ikut lolos ke kursi Senayan dari Partai Nasdem dengan nomor urut 05 dari Dapil Sumatera Selatan 1.

Selanjutnya Bertu Merlas adalah adik kandung dari Gubernur Sumsel Herman Deru, yang merupakan petahana di DPR RI dari PKB, kembali maju bersama PKB dari Dapil Sumsel II dengan nomor urut 1. Untuk sementara Bertu Merlas meraih 90 ribu suara lebih.

Begitu juga dengan mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya meloloskan anaknya Ahmad Wazir Noviadi atau lebih dikenal dengan nama Ovi sebagai anggota DPR RI Partai Gerindra Dapil Sumsel 2 periode 2024 - 2029.

Suara AW Noviadi di Dapil Sumsel 2 sangat besar yakni lebih dari 116 ribu suara. Bahkan Gerindra mendapatkan dua kursi dari Dapil ini.

Hal yang sama diikuti Zaitun, putri Mawardi Yahya dari Gerindra Dapil Palembang 2 sudah memperoleh suara 3500 lebih. Jumlah itu terus meningkat karena penghitungan suara di KPU baru mencapai 44 persen.

Disisi lain praktik dinasti politik juga dilakukan banyak anak pejabat dan istri serta mantan pejabat di Sumsel bahkan untuk sementara unggul di perolehan suara Pileg 2024 menduduki kursi DPRD Sumsel.

Di antaranya Andi Rizkyansyah, putra Pj Bupati Muba Apriyadi asal Dapil 9 Musi Banyuasin (Muba) dari Partai Golkar nomor urut 1. Sampai saat ini sudah memperoleh 31 ribu suara lebih dari 78 persen yang masuk ke KPUD Sumsel. Suara Andi menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan perolehan caleg lain.

Demikian juga Aziz Ari Saputra putra Jakfar Sidiq mantan Wakil Bupati OKI dari PKB Dapil 3 wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir sudah berhasil mengantongi 10 ribu lebih suara. Kemudian M Alki Ardhiansyah putra

dari Iskandar mantan Bupati OKI, asal PAN Dapil 03 OKI – OI sudah mengantongi 9.500 lebih suara.

Ada juga M Syarif Hidayatullah selaku putra Askolani mantan Bupati Banyuasin dari PDI Perjuangan Dapil 10 meraup suara 8.500 lebih dan menjadi yang tertinggi di partainya.

Terakhir Rica Novlianty putri dari Wakil Bupati Musi Rawas Hj Suwanti caleg dari Partai Gerindra dapil 8 wilayah Mura, Muratara dan Lubuklinggau sampai saat ini sudah memperoleh 9000 lebih suara.

Dari uraian diatas jelas dinasti politik bukan hanya milik Jokowi namun semua penguasa dan mantan incumbent di Sumsel juga gencar melakukan praktik serupa di Pemilu 2024.

Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar mengatakan, munculnya dinasti politik karena jaringan dari orangtua masih sangat berpengaruh besar untuk memboyong keluarga agar bisa juga menikmati kekuasaan di parlemen.

“Jadi adanya dinasti politik keluarga pejabat itu mendapatkan kemudahan untuk lolos seleksi caleg dan logistik untuk kampanye. Ini bukan hal yang baru untuk panggung politik di Indonesia,” kata dia.

Bagindo Togar menyebutkan dinasti politik sudah di mulai dari era mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dengan menggendong anaknya Dodi Reza Alex Noerdin di politik bahkan sekarang putrinya Lury Elza Alex maju menjadi caleg dari Golkar dapil VI PALI, Muara Enim dan Prabumulih di Pemilu 2024.

Dilanjutkannya dinasti politik dipraktikkan lebih jor-joran lagi

oleh mantan Gubernur Sumsel Herman Deru

memboyong hampir semua keluarganya. Lalu jejaknya juga diikuti oleh mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya.

“Sekarang ini ada dinasti politik baru yang tengah dibuat itu dinasti politik Apriyadi dan dinasti politik Iskandar,” jelasnya.

Jokowi disebutkan baru-baru ini saja melakukan dinasti politik, sedangkan praktik politik dinasti itu sudah jauh-jauh dulu sempat heboh di Banten, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Bagindo Togar berkata politik dinasti merupakan warisan kekuasaan tradisional yang ada di Indonesia sejak berabad-abad silam. Sejak era autokrasi ikatan genealogis digunakan sebagai dasar regenerasi politik guna melanggengkan kekuasaan.

Direktur Forum Demokrasi Sriwijaya ini menyebutkan politik dinasti sebenarnya sah-sah saja sebab tidak ada aturan yang melarang praktek itu bergulir di Pemilu 2024. Namun rakyat atau masyarakat yang memilihnya nantinya menyesal karena kembali salah menentukan pilihan.

“Mereka ada duit, sarana dan peluru pertahanan (incumbent), jadi sangat memungkinkan untuk mencalonkan diri di parlemen. Jawabannya ada di rakyat kenapa masih dipilih. Setelah menjabat rakyat tidak dipikirkan lagi. Mereka mengurus keluarga saja. Baru menyesal. Kalau saya menyebutnya rakyat suka baper dan melakukan penyesalan semu saja,” pungkasnya.

Akademisi dari Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Khalisah Hayatuddin yang menyebutkan dinasti politik di Pemilu 2024 paling parah. Dia juga menyentil adanya unsur politik uang untuk membeli suara rakyat demi memenangkan jumlah suara.

“Mereka terkadang tidak ada di lapangan tidak ikut sosialisasi tiba-tiba kata warga namanya ada dan bisa menang. Tentunya indikasi politik uang juga digunakan disini. Tentunya saya merasa miris sebab kasihan dengan benar-benar caleg yang turun ke lapangan dan telah membina hubungan dengan konstituen selama satu tahun lebih. Saat uang berbicara semua pemilih lupa dengan keinginan hati nurani mereka,” kata dia.

Dia juga menyebutkan kenapa dia bisa berbicara seperti itu karena dia sendiri merasa sebagai Caleg DPRD Sumsel Partai PPP digadang-gadang gagal karena suaranya tidak bergerak sesuai prediksi. Hal itu dampak dari munculnya pesaing menggunakan kekuatan dinasti politik dan politik uang.

“Politik uang walaupun ada dulu bersembunyi-sembunyi sekarang terang-terangan malah menggunakan perangkat pemerintahan seperti Pak RT setempat. Demokrasi sudah terkoyak-koyak rakyat seakan-akan juga ikut berjoget di atas penderitaan caleg,” pungkasnya. ●RDR





“Kalau saya tebak Hak Angket DPR gagal karena tidak didukung banyak kursi! Kenapa secara pribadi saya sanksi, Nasdem mau bergabung karena Surya Paloh sudah bertemu Jokowi dan PKB juga tidak akan mau bergabung”

Muallimin Pardi Dahlan

HAK ANGKET DAN PEMAKZULAN GAGAL MELEDAK

Isu kecurangan Pemilu 2024 terus digulirkan dengan pengungkapan satu persatu fakta hingga akhirnya berujung pada penggunaan Hak Angket di DPR untuk menelusuri semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

Terlebih adanya rumor kalau Hak Angket DPR ini sebagai upaya pemakzulan Presiden RI ke-7 Joko Widodo seperti dialami oleh Gus Dur Presiden RI ke-4 yang berhasil dimakzulkan pada tahun 2001.

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pemakzulan adalah proses politik di mana pejabat tinggi, seperti presiden, secara resmi dituduh melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.

Opsi Hak Angket sendiri awalnya diembuskan calon presiden (Capres) nomor 03, Ganjar Pranowo memberikan komentar akan mengusulkan kepada partai pengusung untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Bahkan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD nomor 03 tegas berkata apabila hak angket meledak di Parlemen efeknya sangat kuat bisa berdampak pemakzulan kepada kepala negara yaitu Presiden Jokowi.

Isu pemakzulan dan penggunaan Hak Angket ini menjadi isu politik nasional yang menjalar ke seluruh daerah. Meski hembusan itu semakin kuat namun banyak yang menilai hal itu sebuah gertak sambal belaka.

Manuver politik yang dilakukan para elit partai dengan melakukan berbagai pertemuan antara petinggi dan Presiden Jokowi membuat banyak pihak pesimis kalau Hak Angket ini akan terwujud.

Pengamat hukum dan politik Sumsel Muallimin Pardi Dahlan menyebutkan adanya opsi Hak Angket DPR sah-sah saja terjadi tidak melanggar konstitusi dan juga pernah dilakukan. Seperti Hak Angket pemilu legislatif 2009, DPR mengajukan Hak Angket Bank Century tahun 2009 dan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK tahun 2017.

Menurut mantan staf khusus Bupati Muba bidang politik tahun 2022 dan sekarang menjabat Dewan Komisaris PT Petro Muba (Perseroda) ini, ada kejanggalan yang terlihat jelas. Kemudian ada indikasi dari pihak

penyelenggara KPU dan Bawaslu atau pemerintah karena menggunakan aplikasi Sirekap Pemilu 2024.

Nyatanya banyak sekali terjadi kejanggalan dengan mudah diretas. Sehingga dugaan ada penggelembungan suara makin terlihat jelas.

“Kita fokuskan saja coba ke sistem hitungnya saja dulu Sirekap harus diselidiki terlebih lagi servernya di Singapura. Bisa saja alasannya untuk backup keamanan tetapi apa hubungannya harus ke Singapura Pilpres 2024 di Indonesia,” tuturnya.

Dijelaskannya Hak Angket yang dilakukan Ganjar dengan menghimpun mesin politik partai pengusungnya dengan kekuatan fraksi PDI-P dan PPP di parlemen. Lalu dukungan dari paslon nomor 1 memiliki partai pengusung juga ada di DPR seperti PKB dan Nasdem. Hal itu sebagai kekuatan berperang melawan fraksi tim partai pemerintah yang juga memiliki kekuatan di parlemen.

“AMIN merasa dicurangi, kalau bisa merangkul partai-partai pengusung maka bisa saja Hak Angket muncul di parlemen,” jelasnya.

Dilanjutkannya diketahui di DPR RI 2019-2024 hanya ada 9 partai politik yang lolos dan mendapatkan kursi yakni, PDI Perjuangan 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi. Kemudian ada Partai NasDem 59 kursi, PKB ada 58 kursi, Partai Demokrat punya 54 kursi, PKS ada 50 kursi, PAN 44 kursi dan PPP memiliki 19 kursi.

Dipetakannya partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Nasdem dan PKB. Berikutnya paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran PAN, Gerindra dan Demokrat. Kemudian paslon 03 Ganjar dan Mahfud MD ada PDI Perjuangan dan PPP.

Meski punya kesempatan namun Muallimin tidak yakin kalau Hak Angket akan dilakukan partai pengusung 01 dan 03. Ada banyak permainan politik yang dilakukan, kalau salah

strategi maka fatal akibatnya sehingga partai politik berhati-hati menggunakan Hak Angket tersebut.

“Kalau saya tebak Hak Angket DPR gagal karena tidak didukung banyak kursi! Kenapa secara pribadi saya sanksi, Nasdem mau bergabung karena Surya Paloh sudah bertemu Jokowi dan PKB juga tidak akan mau bergabung. Walaupun sama-sama melaporkan adanya beragam kecurangan, alasannya Nasdem dan PKB mereka memiliki kepentingan politik yang berbeda,” ungkapnya.

Disisi lain calon wakil presiden Mahfud MD juga sempat mengatakan Hak Angket meski tidak akan mengubah hasil, dapat menjatuhkan sanksi kepada presiden termasuk pemakzulan Jokowi.

Namun Advokat Sumsel ini menyebutkan kalau pemakzulan Presiden Jokowi

juga sulit untuk dibuktikan.

“Tidak gampang untuk membuktikan presiden itu curang apalagi Jokowi tidak kampanye. Tetapi kata saya kalau benar-benar terbukti ada kecurangan pasti ditemukan penyelenggara oknum KPU dan Bawaslu. Ini seandainya Hak Angket itu berjalan dan terbukti ada pelanggaran tentunya bisa berdampak opsinya bisa saja putaran kedua kemungkinan itu lebih masuk akal kalau pemakzulan Jokowi tidak akan terjadi,” pungkasnya.

Sementara itu Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumsel Yudha Rinaldi membenarkan kalau partai melakukan opsi Hak Angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Bahkan Ganjar dan Mahfud MD sering tampil di publik menggelorakan Hak Angket hingga berpeluang berdampak kepada pemakzulan presiden.

Meski cukup getol melakukan gerakan Hak Angket namun faktanya PDIP juga belum berani mengajukan hal tersebut karena masih dalam kajian.

“Memang benar tapi belum diajukan PDI Perjuangan masih menunggu instruksi Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.

Dia menjelaskan alasan Ketum partai moncong putih julukan Partai PDI Perjuangan belum memberikan lampu hijau untuk koalisi Ganjar melayang Hak Angket juga masih misterius. Namun dia tidak bisa memberikan keterangan detail karena bukan ranah wilayah kerjanya untuk memberikan komentar lebih mendalam.

“Tetapi intinya keputusan hasil belum diumumkan jelas kami juga ada tim survei sendiri, kalau saya masih yakin kita ada potensi dua putaran di Pilpres,” ungkap Yudha. ●RDR



“Kalau dari kondisi seperti ini terjun ke politik bisa merusak reputasi Muhammadiyah. Apalagi kondisi politik sekarang ini sangat memprihatinkan”

Ridwan Hayatuddin



MUHAMMADIYAH PILIH POLITIK DIAM

Hiruk pikuk politik Indonesia sepertinya tidak dirasakan oleh Muhammadiyah hingga banyak yang mempertanyakan dimana posisi mereka saat ini. Dibandingkan Nahdlatul Ulama (NU) yang saat ini masuk dalam segala lini politik Muhammadiyah cenderung terlihat diam. Posisi diam Muhammadiyah ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun heran, kemana arah politik mereka sementara dalam sisi finansial sangat kuat.

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah terkesan menghindari politik di Pemilu 2024. Organisasi Islam Muhammadiyah tidak pernah terdengar di kancah berpolitik nasional. Mereka cenderung fokus pada pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Namun mereka bukan berarti tidak punya sikap politik seperti NU atau lainnya terutama di Pemilu 2024 ini.

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Selatan (Sumsel) Ridwan Hayatuddin menjelaskan kenapa Muhammadiyah lebih pilih

diam di Pemilu 2024 tidak mau memunculkan diri.

“Kalau dari kondisi seperti ini terjun ke politik bisa merusak reputasi Muhammadiyah. Apalagi kondisi politik sekarang ini sangat memprihatinkan. Politik hari ini banyak transaksional tidak cocok dengan kader Muhammadiyah yang lebih mementingkan moralnya,” ucapnya.

Dia menjelaskan, karakter Muhammadiyah ada tiga yakni pertama tidak menonjolkan secara pribadi. Kedua tidak menonjolkan prestasi dan ketiga tidak menonjolkan organisasi.

“Faktanya ada 22 pahlawan nasional yang ternyata Muhammadiyah. Ada Dr Sutomo, ada Jenderal Sudirman, ada Perdana Menteri Ir Juanda. Jadi jangan kaget ada

dia-dia yang selama ini tidak menyebut dari Muhammadiyah ternyata mereka itu Muhammadiyah,” ucapnya.

Kondisi politik di mata Muhammadiyah benar-benar sangat gaduh dan memalukan etika bangsa. Hal itu dapat dilihat setelah Pilpres dan Pileg berlalu, banyak yang tidak puas dengan pelaksanaannya.

Muhammadiyah melihat demokrasi Indonesia saat ini telah membuat malu dan mencederai moral bangsa. Cerita politik transaksional, money politic tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hal ini tentu mengoreng nama demokrasi di Indonesia.

“Bikin malu lagi mereka pelaku-pelaku tidak malu saling timpakan transaksi uang. Protes terjadi dimana-mana bikin gaduh saja,” ucap dosen Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Fakultas Hukum (FH) ini.

Bobroknya politik demokrasi Indonesia ini tentu tidak bisa dikaitkan atau bahkan melibatkan Muhammadiyah karena mereka memang tidak berada dalam lingkaran tersebut.

Muhammadiyah disebutkannya tidak berhubungan dengan pemerintah atau tidak ada kedekatan khusus dengan Presiden Joko Widodo. Namun bukan lantaran memilih diam bukan karena dekat dengan Jokowi atau tidak mau melakukan kritik dan kontrol kepada kinerja pemerintahan.

“Kami tidak ada kedekatan dengan Pak Jokowi, kami diam karena Muhammadiyah bukan organisasi yang menjalankan politik praktis. Kita membolehkan kader untuk berpolitik tapi secara pribadi tidak boleh membawa nama organisasi Muhammadiyah,” tegasnya.

Muhammadiyah disebutnya organisasi yang mendidik akhlak umat Islam dan akhlak bangsa dengan

mendirikan banyak amal usaha di sektor pendidikan. Muhammadiyah mempunyai PAUD, SD, SMP, SMK, SMA, S1 dan S2 di seluruh Indonesia. Itu sesuai perintah pendiri Muhammadiyah Kyai Haji Ahmad Dahlan seorang ulama besar bergelar Pahlawan Nasional Indonesia.

Kader Muhammadiyah yang berpolitik disebutkan Ridwan Hayatuddin sebenarnya banyak tetapi kalah bersaing dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Politik di Indonesia tidak segan-segan menggunakan transaksi uang tidak bisa diikuti oleh kader-kader dari Muhammadiyah.

Sementara mereka cenderung bermain dalam politik moral dan fokus pencerdasan kader bangsa. Sehingga selalu kalah bersaing dengan politik sekarang yang cenderung transaksional.

“Kader Muhammadiyah tidak akan melakukan itu karena bertentangan dengan moral mereka. Makanya kader-kader Muhammadiyah tidak terserap di legislatif dan eksekutif karena faktor tersebut,” pungkasnya.

Dukung Hak Angket

Terkait gejolak politik saat ini yang gaduh hingga menggulirkan isu Hak Angket dan pemakzulan Presiden Joko Widodo, Muhammadiyah mendorong apabila DPR RI itu benar-benar bisa direalisasikan untuk menjaga keadilan Pilpres 2024.

“Teori kuatnya yang bisa melakukan hak angket itu PDI Perjuangan, PKB, Nasdem dan PKS. Jangan saling halang-halangi, lakukan saja Hak Angket,” kata dia.

Namun dia menilai sebagai adanya pemakzulan Jokowi di dalam hak angket DPR RI apabila terlaksana mulai terdengar kuat. Bisa saja sebelum Prabowo Subianto dan Gibran memimpin Indonesia.

“Jelas Hak Angket DPR RI sasarannya Jokowi karena Ma'ruf Amin yang akan menjadi Presiden. Kalau begitu semua sistem yang telah dibuat Jokowi bisa diubah semua sebelum Prabowo Subianto menjadi presiden. Sebenarnya dengan kondisi sekarang sistem presidensial itu selalu gagal. Kalau menurut saya sebaiknya dipisah ada presiden sebagai kepala negara dan ada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan,” jelasnya.

Ridwan Hayatuddin menyebutkan hasil Pilpres 2024 satu putaran Pilpres tidak bisa sebutkan semuanya sudah diatur oleh Jokowi bersama Prabowo. Namun apabila Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ngotot terus mengumpulkan beragam bukti bisa saja Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

“Kalau untuk memverifikasi satu putaran sudah disetting itu masih dibuktikan Anies Baswedan yang ngotot mengumpulkan bukti juga Ganjar kita lihat saja nanti. Kalau kita lihat saja para ahli-ahli profesi para pakar telematika juga turun bisa saja Pilpres 2024 berjalan dua putaran asalkan saja Anies dan Ganjar kompak jangan saling gajul ke,” pungkasnya. ●RDR





“Ini potensi kecurangan atau kejahatan pemilu yang selama ini mungkin tidak pernah dibicarakan atau diungkap ke permukaan secara detail”

Eep Saefulloh Fatah

PSI LOLOS KE SENAYAN

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpeluang menembus ambang batas parlemen 4 persen, meskipun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU memperlihatkan perolehan suara partai ini baru mencapai 2,7 persen pada 26 Februari 2024 pukul 14.00 WIB.

Peneliti Economics & Political Insight (EPI) Center, Mursalin, mengatakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di KPU masih berjalan dan masih ada peluang PSI mendapatkan tambahan suara. “Rekapitulasi di KPU masih terus berlangsung, sementara Sirekap baru mencakup 62,09 persen dari total TPS yang jumlahnya mencapai 823.236,” kata Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 25 Februari 2024.

Sebelumnya, survei yang dilakukan EPI Center pada 9-15 Januari 2024 atau sebulan sebelum pencoblosan memprediksi elektabilitas PSI mencapai 4,2 persen dengan margin of error sekitar 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Seperti halnya survei sebelum pencoblosan, hasil quick count sesaat setelah pencoblosan pun memiliki margin of error, dengan kisaran paling tidak sebesar 1 persen,” jelas Mursalin.

Dengan asumsi optimis PSI meraih 3 persen pada hitung cepat, maka masih ada peluang tipis PSI untuk bisa menembus hingga 4 persen.

Di sisi lain, Mursalin menyoroti soal masih cukup rendahnya perolehan suara PSI, meskipun telah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Hal itu berbeda dengan hasil Pilpres 2024 yang menempatkan pasangan Prabowo-Gibran meraih hingga 58 persen suara, melebihi perkiraan survei.

Sejumlah lembaga survei juga menemukan perolehan suara PSI masih berada di bawah 1 persen sebelum bergabungnya Kaesang Pangarep. Putra Jokowi itu bergabung dengan PSI dan dilantik sebagai ketua umum pada akhir September 2023 atau hanya sekitar empat bulan sebelum pencoblosan.

Setelah Kaesang memimpin PSI, elektabilitas partai itu mulai pulih menyamai perolehan suara pada Pemilu 2019 yang hampir 2 persen. “Artinya ada kenaikan meski-

pun tidak terlalu besar yang diperoleh dari dukungan Jokowi melalui bergabungnya Kaesang sebagai kader PSI,” tutur Mursalin.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Data Riset Analitika, Nana Kardina, yang menilai PSI masih berpeluang meraih 4 persen suara.

Menurut data miliknya, sejak dua pekan menjelang pencoblosan, elektabilitas partai pimpinan Kaesang Pangarep itu sudah memenuhi 4 persen suara. “Survei Data Riset Analitika pada 2-3 minggu menjelang pencoblosan mencatat elektabilitas PSI berada di atas ambang batas 4 persen,” kata Nana.

Nana mengatakan, hasil quick count dari sejumlah lembaga survei menempatkan PSI pada kisaran 2,62-2,90 persen atau mendekati 3 persen. Kemudian, dengan memperhitungkan margin of error di atas 1 persen, PSI masih memiliki peluang untuk meraih suara total 4 persen.

“Jika kita melihat data Sirekap KPU per 23 Februari 2024, data perolehan suara yang masuk dari seluruh TPS di Indonesia baru mencapai 62,09 persen, sehingga masih ada kemungkinan suara dari kantung-kantung pemilih PSI yang belum terhimpun,” ucapnya.

Nana menambahkan, di sejumlah daerah juga masih berlangsung pemilu ulang (PSU), pemilu lanjutan, dan pemilu susulan karena berbagai penyebab. Selain itu, PSI menengarai adanya surat suara yang rusak atau tidak sah mencapai 10 persen pada

Pemilu Legislatif 2024, melonjak dari sebelumnya rata-rata 3-4 persen.

Nana melanjutkan, jika dilihat dari dapil-dapil di mana PSI memperoleh suara yang cukup signifikan, perolehan suara organisasi politik itu memang lebih banyak diperoleh dari mencoblos partai dibanding suara caleg.

Menurutnya, harus diakui bahwa PSI masih belum memiliki tokoh-tokoh yang populer sebagai vote getter, berbeda dari partai-partai besar yang sudah mapan di Senayan.

“Beberapa nama yang cukup akrab dikenal publik seperti mantan ketua umum Grace Natalie dan Giring Ganesha, atau selebritis Helmi Yahya, yang relatif bisa mendulang suara melampaui suara partai,” katanya.

Meski demikian, menurutnya penting bagi PSI untuk membesarkan tokoh-tokoh yang berasal dari kader untuk menghadapi pemilu selanjutnya. “Hal ini sekaligus menjadi catatan bagi PSI untuk bisa merekrut tokoh-tokoh potensial dan membesarkan kader-kader internal jika ingin meraih suara lebih besar lagi dalam pemilu berikutnya,” tuturnya.

Sebelumnya, pakar politik sekaligus pendiri PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, menduga ada indikasi kecurangan pada Pileg 2024 untuk meloloskan PSI, sehingga memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

Dikatakannya, jika PSI mampu sampai pada threshold 4 persen, maka parpol yang dipimpin Kaesang

Pangerap akan memiliki wakil di DPR.

Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PSI berkisar antara 2,5-2,7 persen, sehingga masih jauh dari ambang batas parlemen.

“Kami dapatkan data dari KPU untuk Pilpres maupun Pileg untuk DPR RI. Hasil per TPS untuk Pilpres, lengkap kami dapatkan dari lebih dari 800 ribu TPS. Tidak ada yang kurang, tetapi berbeda dengan hasil Pileg, data yang diterima ada satu lubang yang sangat serius membuat hasil itu tidak lengkap per TPS,” ujar Eep dilansir dari kanal Youtube Keep Talking, Minggu, 18 Februari 2024.

Menurut Eep, lubang itu adalah tidak adanya angka perolehan pencoblosan tanda gambar atau parpol saja. Seperti diketahui, ada tiga cara mencoblos untuk Pileg, yakni mencoblos partainya saja, mencoblos calon saja, dan mencoblos caleg dan partai.

Eep melanjutkan, ketika pemilih mencoblos caleg dan partai, maka setiap caleg akan memiliki data suara per TPS. Jika suara ini dipindahkan atau dicuri, maka caleg akan berteriak karena mereka menjaga suaranya.

Eep mengatakan, bagi partai yang memiliki saksi dan tim pengaman yang kuat tentu saja akan ada protes. Tapi, bagi partai yang pengamanan suara lemah, maka tidak ada yang teriak ketika suara partai tertentu dipindah ke partai lain.

“Ini potensi kecurangan atau kejahatan pemilu yang selama ini mungkin tidak pernah dibicarakan atau diungkap ke permukaan secara detail,” lanjutnya.

Tanpa menuduh penyelenggara pemilu atau siapa pun, Eep menyebutkan bahwa data yang berlubang pada Pileg 2019, pemilih partai atau pencoblosan tanda gambar tidak ada datanya, maka bisa ada dugaan ini salah satu cara untuk pencurian suara.

Dikaitkan dengan lolos atau tidaknya PSI ke DPR, Eep mengingatkan bahwa berdasarkan hasil hitung cepat Pileg 2024, PSI kemungkinan tidak lolos ambang batas parlemen.

“Tetapi kalau tiba-tiba kemudian memperoleh 5 persen atau 6 persen, maka patut kita curigai apa yang terjadi. Ini adalah salah satu modus operandi. Saya tidak menuduh penguasa dengan aparturnya sedang membantu PSI. Sebagai warga negara saya berhak membunyikan alarm sehingga semua orang mendengar,” ungkapnya.

Eep menambahkan, tanda-tanda dugaan penyelewengan kekuasaan dalam Pemilu 2024 sudah terlihat sejak jauh hari, seperti dana bansos yang membengkak menjadi Rp560,36 triliun sejak 2023 hingga penyelenggaraan pemilu.

“Padahal, pada Pemilu 2019 (Pilpres periode kedua Jokowi) jumlah bansos yang dikucurkan Rp194,76 triliun, sedangkan pada Pemilu 2014 jumlah bansos yang digulirkan Rp78,3 triliun,” pungkasnya. •RDO





PPP TINGGALKAN PDIP SIAP GABUNG PRABOWO-GIBRAN

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak menutup opsi untuk bergabung dengan kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memenangkan sejumlah hasil survei hitung cepat untuk Pilpres 2024.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappil) PPP, Sandiag Uno. Dia menyebut PPP merupakan partai pendukung pemerintah dan sampai saat ini partai masih berada dalam pemerintahan.

Dalam Pilpres 2024, PPP bergabung bersama PDIP, Partai Hanura, hingga Partai Perindo membangun kerja sama politik untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

“Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa,” kata Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Kendati demikian, Sandi mengatakan sampai saat ini belum ada tawaran untuk masuk pemerintahan Prabowo-Gibran dan masih fokus kerja.

“Itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih,” kata Sandi.

Sejauh ini, Prabowo-Gibran belum secara resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga Senin, 26 Februari 2024, pukul 15:00 WIB, 77,18 persen dari 823.236 data Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah tertampung masuk.

Suara Prabowo-Gibran semakin jauh meninggalkan dua pasangan calon lain dengan tercatat mengumpulkan 74.820.221 suara atau 58,84 persen. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 31.083.672 atau 24,44 persen, sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebanyak 21.255.657 atau 16,72 persen.

Terkait peluang PPP masuk koalisi Prabowo-Gibran, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan hal tersebut sesuai dengan semangat Koalisi Indonesia Maju yang inklusif.

“Yang akan merangkul semua komponen terbaik bangsa, karena kita punya komitmen untuk bagaimana menjadikan Indonesia maju. Sehingga Insya Allah tidak ada yang ditinggalkan. Jadi bagi kami prinsipnya, siapapun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gi-

bran tentu kami sangat terbuka,” ujar Ace di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyebut, keputusan menerima partai berlambang Kabah itu merupakan hak prerogatif Prabowo yang merupakan seorang presiden terpilih nantinya.

“Saya nggak ngerti soal gabung atau tidak gabung. Itu hak prerogatif presiden terpilih, tapi sekali lagi itu hak prerogatif presiden. Usul dan berharap tentunya boleh, wong namanya negara demokrasi tapi finally tetap presiden yang punya hak prerogatif itu,” kata Nusron.

Meski begitu, ia mengaku senang bila akhirnya nanti PPP bersedia bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran.

“Kalau ada orang ingin bergabung membantu pemerintahan sih pasti kita senang. Namanya juga membantu untuk memperkuat pemerintah,” kata Nusron.

Menurut dia, semua akan indah pada ujungnya, karena memang Prabowo-Gibran adalah pemimpin pilihan rakyat.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku belum mendengar kabar soal rencana bergabungnya PPP dalam koalisi pasangan Prabowo-Gibran.

AHY menekankan Partai Demokrat selaku salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran menyerahkan keputusan kepada Prabowo selaku pemimpin koalisi berkaitan dengan penguatan koalisi.

Namun, ia meyakini bahwa Prabowo akan mengajak bicara para ketua umum partai politik yang saat ini sudah ada dalam koalisi. “Tentunya kita ingin saling memberikan masukan,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

Menurut AHY, penguatan koalisi terus dibicarakan karena seluruh partai pengusung dan pendukung menginginkan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, apabila menang pilpres, sukses dan memiliki dukungan kuat dari parlemen.

“Karena kita juga berharap kebijakan-kebijakan,

program-program yang sudah diangkat sebagai janji politik selama masa kampanye oleh pasangan Prabowo-Gibran ini bisa dikawal dan disukseskan secara bersama-sama,” ujarnya.

Tak Ada Gen Oposisi

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengungkapkan, tiga partai politik diprediksi merapat ke koalisi pemenang Pilpres 2024, Prabowo-Gibran, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PPP.

Bawono menilai, upaya pendekatan Nasdem ke kubu Prabowo-Gibran tampak dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Diyakini, pertemuan tersebut turut membahas peluang Nasdem bergabung ke gerbong Prabowo-Gibran.

Potensi Nasdem bergabung ke pemerintahan mendatang semakin kuat mengingat partai pengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu tak punya sejarah sebagai oposisi.

Nasdem berada di kubu pemerintahan Jokowi selama 2014-2024. Begitupun dengan PKB

yang dimotori Muhaimin Iskandar juga tak memiliki gen oposisi. Sejak Pemilu 2004, PKB selalu berada di pihak pemenang pilpres. Sejalan dengan itu, PPP yang merupakan salah satu partai politik pengusung Ganjar-Mahfud dinilai bakal memanfaatkan peluang untuk bergabung ke penguasa.

“Ketiga partai ini tidak memiliki DNA yang kuat sebagai oposisi,” kata Bawono, Selasa, 27 Februari 2024.

Dari sejumlah partai pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, hanya PDIP dan PKS yang berpotensi menjadi oposisi pemerintah. Sebab, kedua partai pernah berada di posisi tersebut.

Selama 10 tahun, PDIP menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014). Sedangkan, PKS menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024).

“Jadi memang kedua partai ini besar kemungkinan akan mengambil posisi di luar pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan,” tutur Bawono.

Analisis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai PPP merupakan partai yang terbiasa menjadi bagian dari pemerintahan. Arifki menyebut PPP yang berkoalisi dengan PDIP di Pemilu 2024 ini kemungkinan besar tak akan mengikuti langkah partai banteng untuk jadi oposisi. Apalagi di Pilleg 2024 ini, suara PPP sangat rendah dan berpotensi terdepak dari DPR.

“PPP partai yang terbiasa menjadi bagian dari pemerintahan. Sebagai partai yang tidak ada pemilik saham mayoritas, PPP bakal dengan mudah bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kongres PPP selanjutnya, bakal menjadi jalan untuk meninggalkan kubu oposisi yang rencana bakal dibentuk partai Paslon 01 dan Paslon 03,” kata Arifki.

Menurut Arifki, perubahan sikap politik PPP tidak akan sulit. Jika ketua umumnya berganti, jalan PPP untuk meninggalkan kubu oposisi bakal lebih mudah.

“Cara PPP bergabung dengan pemerintahan sama dengan Golkar. Karena memang partai ini tidak ada pemiliknya,” ujar Arifki. ● RDO





“Untuk Pilgub DKI Jakarta masih Ahmed Zaki, belum ada calon lain”

Basri Baco

INFO PILKADA

Minggu IV • Februari 2024

15

KESENJANGAN SOSIAL JADI TANTANGAN AHMED ZAKI

Nama Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki digadagadag sebagai kandidat kuat yang akan diusung Partai Golkar untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco menegaskan bahwa hingga saat ini tiket untuk Pilgub DKI Jakarta 2024 diberikan kepada Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki bukan Ridwan Kamil.

“Untuk Pilgub DKI Jakarta masih Ketua Zaki, belum ada calon lain,” ungkapnya, belum lama ini.

Sedangkan untuk Ridwan Kamil atau RK diberi mandat oleh Golkar untuk maju Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) untuk periode kedua.

“RK Masih di Jabar,” sambungnya.

Diketahui bahwa Ahmed Zaki Iskandar mengaku telah mendapatkan mandat dari Partai Golkar untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

“Siapa, sudah terima mandat sejak November 2023 kalau tidak salah penyerahan mandatnya,” kata Zaki.

Dia mengatakan siap menjalani mandat sesuai yang sudah diputuskan oleh partai. Bila partai ingin mengabdikan di Jakarta, Zaki mengaku siap melaksanakannya.

“Cuma, kembali lagi kalau pun disuruh ke Jakarta, kita serdadu ya siap saja,” kata dia.

Zaki merupakan kader Golkar sejak 1992. Dia pernah menjabat sebagai kepala daerah, yakni Bupati Tangerang dua periode 2013-2023.

Tahun 1992 sebelum lulus SMA, Zaki sudah jadi kader Golkar dan mendapat KTA Golkar setelah lulus SMA.

“Itu sampai tahun 2000, dari kader biasa jadi pengurus, jadi ketua AMPG, 2004 itu terpilih jadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang sampai 3 periode 2019, 2020 baru Jakarta,” kata Zaki.

“Ya, memang ini karier saya sebagai kader Golkar. Sebelum jadi bupati pun 2009 itu saya ikut pencalonan legislatif ke DPR RI, dan terpilih,” imbuhnya.

Zaki mencatat pengala-

man pemerintahannya ketika menjabat sebagai bupati Tangerang selama dua periode. Dia juga menekankan pengalaman legislatifnya sebagai anggota DPR RI.

“Saya memiliki rekam jejak sebagai pimpinan daerah selama dua periode di Kabupaten Tangerang dan juga sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009-2012,” ungkap Zaki.

“Pengalaman ini menjadi bagian dari CV saya di Partai Golkar, sehingga saya diusulkan sebagai salah satu calon pimpinan daerah di Provinsi DKI Jakarta,” tambahnya.

Zaki berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan sosial yang masih ada. Baginya, masalah kesenjangan sosial tetap menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta.

“Khususnya dalam hal permukiman, sanitasi, dan kebutuhan hidup masyarakat. Kami berupaya memperpendek rasio kesenjangan sosial,” ujar Zaki.

“Kondisi ini adalah peringatan bahwa kerawanan sosial di Jakarta sangat rentan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di Jakarta,” lanjutnya.

Bang Zaki, yang telah diberikan mandat oleh partainya sebagai calon Gubernur DKI, menyoroti beberapa isu utama yang perlu diselesaikan, seperti permukiman, sanitasi, dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Dengan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek ini, kami bertekad untuk mereduksi tingkat kesenjangan sosial yang tinggi di DKI Jakarta,” ujar Bang Zaki.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta men-

peringkat kedua dalam hal kesenjangan sosial, sebuah fakta yang sangat mengkhawatirkan bagi Bang Zaki.

“Ini adalah peringatan bagi kita semua. Tingginya tingkat kerawanan sosial membutuhkan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial,” tambahnya.

Bahkan, Ahmed Zaki Iskandar telah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Jakarta setelah diberikan mandat untuk menjadi bakal calon gubernur.

Mantan Bupati Tangerang itu menyatakan, permasalahan di DKI Jakarta tak jauh berbeda dengan wilayah yang pernah dipimpinnya selama dua periode,

2013-2018 dan 2018-2023.

“Dari identifikasi, permasalahan di Jakarta itu tidak lebih kompleks dari Kabupaten Tangerang,” ujar Zaki.

Hanya saja, populasi dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta yang lebih besar dari Kabupaten Tangerang menjadi tantangan tersendiri untuk menjadi orang nomor satu di ibu kota.

“Misal populasi yang tinggi, itu menimbulkan pengangguran yang tinggi. Kebutuhan lapangan pekerjaan. Dan paling penting di DKI ini adalah kesenjangan sosial antar-masyarakat di Jakarta,” ucap Zaki.

“Begitu juga dengan masalah-masalah infrastruktur. Kemudian banjir masih ada, macet apalagi,” lanjut dia.

Sementara untuk permasalahan sampah, menurut Zaki, wilayah DKI tak jauh berbeda dari Kabupaten Tangerang. Perbedaannya hanya pada ruang menata kawasan.

“Berbeda dengan DKI yang sudah terbangun sedemikian rupa dengan kondisi yang sangat padat,” ucap Zaki.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta menduduki peringkat kedua dalam hal kesenjangan sosial, sebuah fakta yang sangat mengkhawatirkan bagi Bang Zaki.

“Ini adalah peringatan bagi kita semua. Tingginya tingkat kerawanan sosial membutuhkan tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial,” tambahnya.

Bang Zaki, yang memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI dan Bupati Tangerang dalam dua periode, telah mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk maju dalam kontestasi politik di DKI Jakarta.

Meskipun demikian, Bang Zaki belum bersedia untuk membahas secara rinci tentang pencalonannya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada akhir tahun ini. ●IRY





BERKOALISI HARUS MENGUNTUNGKAN

Setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) RI, kini bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bengkulu 2024 mulai memunculkan tiga kandidat kuat untuk maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) bengkul 2024.

Pakar politik dari Universitas Bengkulu (Unib), Dr Panji Suminar MA, menyatakan hanya ada tiga tokoh yang memiliki peluang besar dalam Pilgub Bengkulu 2024.

Diantara tiga tokoh yang menonjol, salah satunya adalah Gubernur Bengkulu saat ini, Rohidin Mersyah, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Bengkulu.

Tokoh lainnya adalah Mian, Bupati Bengkulu Utara yang merupakan seorang kader PDIP yang cukup dikenal, meskipun bukan sebagai ketua partai tingkat provinsi.

Terakhir, terdapat nama Helmi Hasan, mantan Walikota Bengkulu yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Kota Bengkulu.

“Selain dari tiga tokoh yang menonjol ini, saya belum melihat tokoh dari partai lain yang cukup menonjol untuk maju dalam Pilgub Bengkulu 2024 mendatang,” kata Panji, beberapa waktu lalu.

Di luar dari ketiga nama ini, peneliti dari lembaga Panji Research and Consulting mengatakan bahwa Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, sebenarnya cukup menarik perhatian.

Namun, Pilgub 2024 dianggap belum menjadi waktu yang tepat bagi Gusnan untuk maju dalam Pilgub Bengkulu. Selain karena elektabilitasnya, suara Gusnan juga diprediksi akan terpecah oleh suara Rohidin.

Menariknya, Panji menilai bahwa kemenangan Prabowo yang didukung oleh Golkar dan PAN tidak akan membawa banyak pengaruh bagi Rohidin maupun Helmi.

Situasi yang terjadi di tingkat nasional saat ini, seperti kemenangan Prabowo meskipun berdasarkan quick count, tidak akan berdampak sama di Bengkulu.

“Bengkulu memiliki kompleksitas elektoral yang tinggi. Keanekaragaman etnisnya tidak dapat diabaikan dan menjadi pertimbangan penting. Jadi, tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi di Pulau Jawa,” ujar Panji.

Untuk meningkatkan suara dalam Pilgub mendatang, masing-masing calon yang kuat, terutama tiga nama ini, harus memilih pasangan yang berasal dari daerah atau kalangan tertentu.

“Hal ini juga menyebabkan koalisi partai dalam Pilgub 2024 besar kemungkinannya tidak akan sejalan atau sama dengan koalisi dalam pilpres saat ini,” ungkapnya.

Masing-masing calon yang maju harus memperhatikan pasangannya untuk mendapatkan suara di daerah atau komunitas tertentu demi meraih kemenangan.

“Berkoalisi itu harus menguntungkan. Saya kira akan terjadi lintas koalisi dari pilpres. Tidak akan sama,” ungkap Panji.

Meskipun memperoleh suara tertinggi dalam perhitungan sementara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Bengkulu, Partai Golongan Karya (Golkar) Bengkulu telah mengumumkan niatnya untuk tetap berkoalisi dalam Pilgub mendatang.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Bengkulu, Rohidin Mersyah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan internal partai Golkar dan data resmi dari KPU, caleg Golkar di tingkat DPRD Provinsi Bengkulu hampir meraih kemenangan di seluruh kabupaten.

“Dari hasil perhitungan internal kami dan rekapitulasi dari KPU, Partai Golkar mampu mempertahankan posisinya di tingkat provinsi maupun DPR RI,” ungkap Rohidin Mersyah.

Meskipun ada peluang besar bagi caleg Golkar untuk meraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi Bengkulu, antara 9-10 kursi, Rohidin Mersyah menegaskan bahwa partainya tetap terbuka untuk berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk dalam Pilgub yang akan datang.

“Kami percaya kolaborasi dan koalisi adalah kunci. Meskipun kami memiliki potensi untuk maju sendiri, kami membuka diri untuk berkolaborasi. Kebersamaan adalah kunci untuk membangun Bengkulu yang lebih baik,” ujarnya.

Terkait rekomendasi nama-nama yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk Pilgub

2024, Rohidin Mersyah menyebut bahwa ada beberapa nama yang diajukan, meskipun tidak memberikan detail.

“Masih ada beberapa nama. Golkar siap untuk mengusung pasangan yang paling layak dan pantas untuk memimpin Bengkulu,” katanya.

Dengan sikap terbuka untuk berkolaborasi dan memilih pemimpin yang terbaik, Partai Golkar Bengkulu menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas politik dan memajukan pembangunan daerah.

Keputusan akhir mengenai kolaborasi dan kandidat Pilgub akan menjadi perhatian masyarakat Bengkulu dalam waktu dekat.

Sementara, Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu, Helmi Hasan, mungkin tidak akan maju sebagai Cagub Bengkulu pada Pilkada 2024. Hal ini disebabkan karena perolehan kursi DPRD Provinsi dari PAN tidak memenuhi syarat yang diinginkan oleh Helmi Hasan, yaitu minimal 7 Kursi.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, hingga saat ini PAN pada Pemilu tahun 2024 memperoleh 6 kursi DPRD Provinsi Bengkulu.

“Majunya Helmi Hasan sebagai calon gubernur tergantung pada perolehan 7 kursi oleh PAN, setidaknya 7 kursi DPRD Provinsi Bengkulu,” kata Mantan Wali Kota Bengkulu itu.

Meskipun perolehan kursi PAN saat ini adalah 6 kursi, yang merupakan kenaikan signifikan sebesar 300% dari Pemilu 2019, di mana PAN hanya mendapatkan 2 kursi DPRD Provinsi Bengkulu.

Meskipun terjadi kenaikan 300% dalam perolehan kursi PAN pada Pemilu 2024 di DPRD Provinsi Bengkulu, namun angka tersebut masih belum memenuhi syarat 7 kursi yang diinginkan Helmi Hasan untuk maju sebagai calon gubernur.

Dengan kemungkinan batalnya Helmi Hasan maju sebagai calon Gubernur Bengkulu, beberapa harapan dari masyarakat yang selama ini berharap pada kepemimpinan Helmi sebagai gubernur, seperti harapan akan kelancaran pembangunan, BPJS gratis, Ambulans gratis, dan program peduli anak yatim di Provinsi Bengkulu, akan sirna. ● IRY





“Andi Sudirman telah melakukan banyak perubahan terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan selama menjabat”

Andi Lukman Irwan

MASYARAKAT SULSEL INGIN SOSOK PEMIMPIN MERAKYAT

Andi Sudirman Sulaiman sebagai kandidat Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Selatan (Sulsel) terkuat melewati rivalnya, berdasarkan dari hasil survei

Salah satu hasil survei menunjukkan Andi Sudirman Sulaiman sebagai tokoh teratas dengan elektabilitas tertinggi sebagai Cagub Sulsel, mengungguli politisi lainnya seperti Nurdin Halid dan Adnan Purictha YL.

Berdasarkan survei Celebes Research Center (CRC), elektabilitas deretan tokoh di Sulsel adalah sebagai berikut: Andi Sudirman Sulaiman 33,37 persen, Nurdin Halid 16,26 persen, Adnan Purictha YL 5,29 persen, Ilham Arif Sirajuddin 2,87 persen, dan Danny Pamanto 0,59 persen.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Lukman Irwan menyatakan bahwa masyarakat menganggap Andi Sudirman layak dan sangat potensial untuk memimpin Sulsel.

“Andi Sudirman telah melakukan banyak perubahan terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan selama menjabat. Masyarakat melihat dan merasakan dampak dari tindakannya. Publik menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Andi Sudirman,” kata Andi Lukman Irwan pada Minggu 14 Januari 2024.

Menurutnya, Andi Sudirman telah meninggalkan legacy yang

sangat bermanfaat bagi masyarakat Sulsel sehingga kepemimpinannya masih dinantikan.

“Andi Sudirman telah meninggalkan banyak legacy, dan ini menjadi salah satu faktor kunci mengapa elektabilitasnya masih kuat sebagai calon gubernur di Sulsel nantinya,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat Sulsel selalu menantikan sosok yang merakyat dan tanpa sekat dalam berinteraksi, namun tetap memiliki kepemimpinan yang kuat dalam mengelola organisasi pemerintahan. Menurut Andi Lukman, kriteria-kriteria ini melekat pada diri Andi Sudirman Sulaiman.

“Andi Sudirman juga dikenal sebagai sosok yang merakyat dan memiliki kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan,” tambah-

nya. Ditambahkan pengamat komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma mengungkapkan perilaku belakangan ini menunjukkan indikasi bahwa Andi Sudirman Sulaiman akan kembali bertarung di Pilgub Sulsel.

“Andi Sudirman telah aktif dalam berbagai kegiatan yang selalu

mengedepankan sosialisasi diri atau berinteraksi dengan masyarakat, dan menurut saya hal tersebut merupakan ciri yang jelas dari sosialisasi diri,” ungkapnya.

Peluang besar Andi Sudirman maju Pilgun Sulsel sangat besar dan tidak ada penghambat yang begitu berarti.

Sukri juga membahas adanya wacana Andi Amran Sulaiman, yang ikut serta dalam Pilgub. Menurutnya, jika saudara kandungnya tersebut turut bertarung, Andi Sudirman mungkin memilih untuk tidak ikut serta.

“Salah satu alasan lainnya, mungkin Andi Sudirman akan lega jika tidak ada persaingan dari Andi Amran, karena tidak mungkin keduanya ikut serta dalam Pilgub, harus ada yang mengalah,” jelas Sukri.

Dia juga menyatakan bahwa jika Andi Sudirman memutuskan untuk maju dalam Pilgub, maka peluang kemenangannya cukup besar. Terutama dengan statusnya sebagai petahana yang kinerjanya sudah diakui oleh masyarakat.

“Umumnya, petahana memiliki keunggulan dibandingkan dengan kandidat lainnya di awal, karena popularitasnya yang tinggi dan sudah dikenal oleh masyarakat, yang kemudian dapat menjadi jalan menuju elektabilitas yang tinggi,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena peluangnya yang begitu besar.

Presiden PKS, Ahmad Syaikh, mengungkapkan Andi Sudirman memiliki peluang yang besar untuk kembali diusung sebagai Cagub Sulsel, terutama karena posisinya sebagai petahana memberikan keuntungan tersendiri.

“Dengan keberadaannya sebagai petahana, saya yakin Sudirman memiliki peluang besar untuk kita dukung kembali,” ujarnya.

Ahmad juga mengimbau agar Sudirman dapat menjalin komunikasi yang lebih awal dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Makassar. Proses pencalonan dalam Pemilihan Gubernur memiliki tahapan tersendiri.

“Pencalonan Pilgub memiliki tahapan yang harus diikuti, dimulai dari DPW, kemudian diserahkan ke DPP. Semoga Pak Gubernur dan DPW PKS dapat lebih aktif berdiskusi lebih awal terkait Pilgub ini,” jelasnya.

Menurut Ahmad, jika kesepakatan terkait Pilgub Sulsel dapat dicapai lebih awal, maka PKS juga dapat memperjuangkan calonnya dengan lebih efektif.

Walau demikian, Ahmad juga menegaskan bahwa PKS akan membuka peluang bagi siapa pun yang ingin berjuang bersama partai tersebut.

“Kita memberikan kesempatan bagi calon lain juga, namun sebagai petahana, Pak Gubernur memiliki peluang yang lebih besar,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada Pilgub Sulsel 2018, PKS bersama dengan PDIP dan PAN berkoalisi untuk mengusung Nurdin Abdullah berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman. Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dengan meraih dukungan lebih dari 1,8 juta suara pemilih.

Namun, nama berpeluang jadi calon penantang Andi Sudirman Sulaiman. Salah satu nama calon bintang adalah Danny Pomanto, Wali Kota Makassar dua periode.

Terbaru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal mengusung Danny Pomanto, sinyal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono.

PPP berkoalisi PDI Perjuangan di Pilpres 2024 ini.

Muhamad Mardiono menyatakan bahwa Pomanto memiliki potensi besar untuk maju dalam pemilihan gubernur setelah Pemilu Serentak.

“Saya pikir potensi besar yang nanti setelah pemilu akan kita bicarakan kembali bagaimana untuk melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan di Kota Makassar ini bisa dilanjutkan lagi,” ujar Mardiono.

Pernyataan Mardiono ini memberikan sinyal bahwa PPP menganggap Pomanto sebagai calon yang potensial dan mungkin untuk diusung dalam Pilgub Sulsel 2024.

Meskipun belum ada keputusan resmi dari PPP, pernyataan ini menyoroti peran strategis dan popularitas yang dimiliki oleh Danny dalam dinamika politik di Sulsel.

• IRY



“Kita sudah mengalokasikan anggaran yang cukup banyak dari provinsi, juga bisa ditambah dari APBD Kabupaten/Kota, bisa ditambah dari yang bersumber dari APBD desa”

Agus Fatoni



SUMSEL LAUNCHING GSMP GOES TO SCHOOL AND GOES TO OFFICE

Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni terus berupaya menekan laju inflasi, salah satunya dengan melaunching Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School and Goes to Office.

Kegiatan ini dilaksanakan di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Minggu 25 Februari 2024.

GSMP Goes to School and Goes to Office merupakan bentuk sinergitas antara Pemprov Sumsel bersama Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi Sumsel.

Program ini merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPISS) yang selaras dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Launching ditandai dengan penyerahan 5.000 bibit cabai siap tanam oleh Fatoni secara simbolis kepada SMA/SMK di Sumsel yang telah ditetapkan sebagai pilot project dari kegiatan launching tersebut.

Fatoni mengatakan GSMP Goes to School Goes to Office sebagai bentuk keseriusan Pemprov Sumsel dalam mengendalikan inflasi. Nantinya pemberian bibit tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumsel yang nantinya ditanam oleh pihak sekolah dan perkantoran di lahan sekitar.

“Kita sudah mengalokasikan anggaran yang cukup banyak dari provinsi, juga bisa ditambah dari APBD Kabupaten/Kota, bisa ditambah dari yang bersumber dari APBD desa. Ini semua perlu kita lakukan secara masif agar gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini betul-betul membuat Sumsel Mandiri akan pangannya dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari,” kata Fatoni.

Fatoni mengimbau para Kepala Sekolah untuk segera melaporkan kebutuhan bibit yang diperlukan sehingga dapat menjadi dasar Pemprov Sumsel dalam memberikan bantuan bibit ke masing-masing sekolah.

“Kepala sekolah segera laporkan kebutuhan bibitnya, karena ini menjadi dasar kita untuk memberikan bantuan. Saya juga berpesan agar kegiatan ini dipublikasikan secara luas, sehingga yang kita lakukan diketahui masyarakat bahwa kita banyak melakukan upaya untuk memajukan Sumsel terutama untuk kesejahteraan



masyarakatnya,” ucap Fatoni.

Kedepannya sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumsel maupun kantor instansi vertikal akan menanam bibit-bibit yang diberikan, termasuk juga di desa kelurahan dan kecamatan. Bibit tersebut berupa anaman cabai, bawang merah dan komoditas lainnya.

“Terus kita lakukan gerakan ini, untuk melengkapi upaya gerakan kita dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh instansi dan masyarakat dalam rangka penanganan dan pengendalian inflasi. Surat edaran sudah saya tandatangi, saya sudah minta ke sekolah, BUMN, BUMD, Bupati/Walikota sebelum launching, untuk turut serta mensukseskan gerakan ini, mulai dari pembagian bibit, penganggaran dan monitoring,” jelas Fatoni.

Belum lama ini, Pemprov Sumsel telah melaunching Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPSStSS). Bahkan Pemprov Sumsel telah melaunching secara resmi Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel (GPMSS).

“Melalui Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Selatan, Pemprov Sumsel mengadakan Operasi Pasar Murah yang berlangsung di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel secara serentak setiap hari Senin, Selasa dan Kamis hingga Idul Fitri mendatang. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, dan diharapkan juga dapat



meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumsel,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BI Perwakilan Sumsel Ricky Perdana Gozali mengatakan Provinsi Sumsel patut berbangga karena capaian inflasi pada tahun 2023 inflasi gabungan dua Kota di Provinsi Sumsel tercatat sebesar 3,17% year on year, yang dimana lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada Tahun 2022 sebesar 5,94%.

BI Perwakilan Sumsel telah bersinergi dengan Pemprov Sumsel untuk menginisiasi launching GSMP Goes To School and Goes to Office sejalan dengan gerakan nasional pengendalian inflasi Pangan atau GNPIP.

“Sejalan juga dengan arahan bapak Presiden Republik Indonesia pada rakornas inflasi Tahun 2022 lalu, tahun ini gerakan Sumsel Mandiri Pangan kembali diperkuat dengan perluasan inovasi yang menasar pelajar serta pegawai instansi dan koperasi swasta se-sumatera Selatan,” katanya.

Prosesi launching GSMP Goes To School and Goes to Office ditandai dengan hand scanning oleh Pj Gubernur Agus Fatoni didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Ricky Perdana Gozali dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Kelik Budiana.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pemberian piagam penghargaan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel kepada Pemprov Sumsel, atas upaya perluasan digitalisasi daerah melalui Qris di Provinsi Sumsel tahun 2023.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Ricky Perdana Gozali kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni.

Tutup hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Perwakilan dari Forkopimda Sumsel, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Basyaruddin Akhmad, Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. ●IRY



“Jika dimungkinkan pelaksanaan model umroh bayar kemudian, sehingga pegawai bisa berangkat umroh”

Agus Fatoni

GANDENG BSI, SUMSEL SIAPKAN SKEMA UMROH BAYAR NANTI

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni berharap Bank Syariah Indonesia (BSI) Palembang dapat terlibat dalam program bedah rumah serentak, penanganan stunting dan inflasi di Sumsel.

Hal ini diungkapkan saat menerima audiensi Regional CEO III BSI Palembang Wachjono di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Senin 26 Februari 2024.

“Rabu lalu, kami sudah launching GBRSS, GPSSS, dan GPStSS. BSI bisa support Gerakan Serentak ini, melalui BSI yang ada di Cabang Kabupaten/Kota. Saat ini terdapat 8.391 unit rumah yang akan dibedah. Jumlah ini kemungkinan besar bisa bertambah. Maka silakan BSI bisa mendukung program ini,” ucap Fatoni.

Kemudian, Fatoni juga menyambut baik peluang kerjasama yang dapat dilakukan antara Pemprov Sumsel dan BSI.

Bahkan tak menutup kemungkinan terkait usulan kerjasama skema umroh bayar nanti.

“Jika dimungkinkan pelaksanaan model umroh bayar kemudian, sehingga pegawai bisa berangkat umroh. Terlebih lagi saat ini banyak anak muda yang terdorong minatnya untuk umroh namun terkendala pada biaya,” kata Fatoni.

Kendala ini harap Fatoni tentu bisa dibantu dengan pola bayar kemudian. Sedangkan untuk program zakat, dia menyebut kerjasama ini bisa didiskusikan kembali antara BSI dengan Baznas.

“Silakan saja menjalin kerjasama dengan Pemprov Sumsel. Manfaatkan peluang-peluang yang ada. Apalagi BSI ini kekuatannya ada di daerah-daerah hingga pelosok,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Regional CEO III BSI Palembang Wachjono menjelaskan tentang profil BSI yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, dimana pihaknya akan terus mengembangkan dan membina bank syariah.

“Di Sumsel ini ada 45 cabang BSI dengan market share 5%. Banyak program yang kami berikan untuk masyarakat dan pembiayaan tumbuh hingga Rp 4 triliun. Untuk kegiatan di bidang spiritual kami menggandeng Baznas,” ujarnya.

Sebagai pihak yang ditunjuk Kemenkeu dalam pelaksanaan bank syariah, karena itu lanjut Wachjono pihaknya akan berkomitmen memberikan manfaat bagi umat di Sumsel.

Saat ini, BSI telah mempunyai cabang di Dubai dan dalam waktu dekat akan membuka cabang di Madinah dan masih banyak lagi daerah yang akan melakukan kerja-

ma termasuk diantaranya menjajaki kerjasama dengan Pemprov Sumsel.

“Untuk itu kami juga ingin menjajaki kerjasama dengan Pemprov Sumsel,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemprov Sumsel baru saja meluncurkan Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), membenahi 8.391 unit rumah secara berkala.

“Jumlah ini kita harapkan akan terus bertambah karena kita akan menginventarisir data masyarakat yang akan ikut serta bedah rumah,” ucap Agus Fatoni.

Fatoni mengatakan ribuan unit rumah

tersebut akan diresmikan pada HUT ke-78 Provinsi Sumsel tanggal 15 Mei 2024 mendatang. Diharapkan angka tersebut bisa menembus rekor MURI.

“Ini kita berharap pada saat peresmian pada saat HUT Provinsi Sumsel nanti kita bisa masuk ke rekor MURI,” kata Fatoni.

Sebagaimana diketahui, bantuan dana dari CSR dapat dianggarkan untuk membedah 75 rumah, kemudian dari APBD 3.666 rumah, APBN 1.345 rumah, Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota 345 rumah dan akan tetap bertambah. Bahkan, Baznas Kabupaten/Kota nantinya akan membangun

10 rumah setiap bulannya.

“Kalau dari dana desa ada 1.293 rumah ini akan kita tambahkan, nantinya akan kita sosialisasikan terus karena bisa digunakan untuk bedah rumah,” ucap Fatoni.

“Dari Dinas Sosial bantuan untuk sanitasi juga banyak, dari Bantuan Keuangan Pemprov juga ada Rp 2 miliar per Kabupaten/Kota sehingga akan membangun 20 rumah dalam bedah rumah, jadi minimal ada 8.931 rumah yang akan bisa dibedah rumah,” sambungnya.

Oleh karena itu, Fatoni mengajak seluruh stakeholder, salah satunya Tim Penggerak PKK untuk dapat bersama-sama Pemprov Sumsel bersatu padu penuh semangat, bekerja keras, menjaga nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian membangun Sumsel. Ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan kunjungannya kali ini sebagai upaya percepatan pembangunan dalam melayani masyarakat.

Dia juga berharap Provinsi Sumsel dapat menjadi daerah percontohan dalam penanganan stunting.

“Kita mendorong percepatan pembangunan untuk melayani masyarakat, yaitu bedah rumah, sanitasi dan stunting. Karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kita juga berharap bahwa Sumsel dapat menjadi project percontohan bagi nasional, tapi ini salah satu yang terbaik,” ucapnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian, Pj Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Tyas Fatoni, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Sumsel, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan pejabat lainnya. ●IRY



“Kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya”

Zarkasih Nur



PECAH SUARA DPR GULIRKAN HAK ANGKET

Wacana hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 yang didorong Ganjar Pranowo disambut kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Hingga kini, sebanyak empat fraksi partai di DPR telah mendukung usulan yang digulirkan PDIP. Selain PDIP, tiga partai pendukung Anies-Muhaimin adalah Partai NasDem, PKB, dan PKS. Mereka akan berhadapan dengan empat fraksi partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Sementara, satu partai pendukung Ganjar dan Mahfud MD, yakni PPP, hingga kini belum menentukan sikap. Teranyar, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur, mengimbau jajaran partainya di DPR berpikir cermat soal wacana hak angket yang didorong Golkar di DPR. Dia menilai hak angket hanya berpotensi menimbulkan perpecahan.

Aturan hak angket terutang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Di sana, hak angket antara lain di-

lakukan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil angket berupa rekomendasi yang ditujukan kepada MPR untuk mengambil keputusan.

Hak angket diusulkan paling sedikit 25 anggota DPR dari lebih dari fraksi. Namun, pengambilan keputusan akan ditentukan oleh lebih dari 50 persen dari total 575 anggota dewan.

Bila ditotal, pihak fraksi yang mendukung wacana hak angket hingga saat ini mencapai 295. Rinciannya, 128 kursi milik PDIP, 59 kursi Fraksi NasDem, 58 kursi PKB, dan 50 kursi milik PKS. PPP belum masuk hitungan karena belum ada pernyataan resmi dari fraksi mereka yang mendukung usulan tersebut. Jumlah kursi fraksi PPP di DPR mencapai 19.

Sementara, pihak yang menolak wacana hak angket dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran mencapai 261. Rinciannya, 85 kursi milik Partai Golkar, 78 kursi milik Partai Gerindra, 54 kursi Partai Demokrat, dan 44 kursi milik PAN.

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menanggapi usulan pembentukan pansus hak angket yang digulirkan oleh partai politik yang berada di kubu 1 dan 3. Namun, ia meyakini bahwa ada ketidakkompakan dari mereka yang ingin mengusulkan hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024.

“Saya kira demikian (partai politik pendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024 tak kompak), kita lihat saja,” ujar Ace di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

Keyakinannya tersebut beralasan, karena ia melihat partai politik yang berada di kubu 1 dan 3 juga objektif melihat hasil Pemilu 2024. Apalagi mayoritas dari mereka juga merupakan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Saya yakin para ketua umum partai, terutama partai pendukung pemerintah akan objektif terhadap bagaimana seharusnya hak angket itu ditempatkan. Tentu Partai Golkar menolak terhadap hak angket tersebut,” ujar Ace.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, juga menegaskan bahwa partai ber-ingin tidak akan mendukung penggunaan hak angket di parlemen.

“K a l a u

Golkar kan tidak mendukung hak angket,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

Ia mengatakan, hak angket merupakan hak politik di DPR, bukan di pemerintahan. “Itu kan hak politik di DPR, bukan pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, meragukan soliditas partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam mendorong hak angket di DPR RI. sejumlah faktor ditengarai bakal membuat kedua kubu tidak akan satu suara dalam usaha untuk menggulirkan hak angket.

“Soliditas partai-partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 untuk mengajukan hak angket terhadap pemerintah terkait dengan soal dugaan kecurangan pemilu patut diragukan,” kata Bawono di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Menurut dia, partai-partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 akan lebih bersikap realistis. “Mereka akan realistis dengan menerima hasil dari pemilu ini ketimbang menghabiskan energi politik untuk hak angket di DPR RI,” kata Bawono.

Pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi Istana Negara pada pekan lalu, menurut Bawono, dapat dilihat sebagai bentuk cerminan partai utama pendukung Anies untuk bersikap realistis menerima hasil Pemilu 2024. Mereka mencari peluang berkoalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran ketimbang berperan sebagai oposisi selama lima tahun mendatang.

“Apalagi selama berkiprah di panggung politik nasional Partai Nasdem tidak memiliki DNA sebagai partai oposisi,” ucap Bawono.

Menurut dia, langkah Partai Nasdem tersebut bukan tidak mungkin nanti juga akan diikuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bukan tidak mungkin pula, dalam waktu dekat ini Muhaimin Iskandar akan juga bertemu Presiden Jokowi.

“PKB akan lebih memilih untuk juga bersikap realistis menerima hasil pemilu dan melihat peluang untuk bergabung di dalam pemerintahan,” ujarnya.

Dengan begitu wacana dari segelintir elite politik untuk menggulirkan hak angket di DPR RI terhadap pemerintah hampir dapat dipastikan tidak akan memperoleh dukungan politik memadai dari partai penghuni Senayan. ●IRY





“Karena memang pembayaran untuk THR diharapkan 10 hari kerja sebelum Idul Fitri, jadi kira-kira di pertengahan Ramadan”

Isa Rachmatarwata

THR DAN GAJI 13 ASN CAIR 10 HARI SEBELUM IDUL FITRI

Persiapan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dibayarkan pada tahun 2024 telah dilaporkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dijelaskan Sri Mulyani persiapan dari pembayaran THR dan gaji ke-13 sudah ada dalam Undang-undang APBN 2024.

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden untuk persiapan dari pembayaran THR dan gaji ke-13 ya, kan itu sudah ada dalam Undang-undang APBN 2024,” ungkap Sri Mulyani.

Persiapan yang dimaksud yaitu mengenai persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur pembayaran THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024. Persiapan dimulai dari sekarang untuk kelancaran pencairan yang rencananya akan dibayarkan mulai H-10 sebelum Idul Fitri.

“Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran kan harus mulai dibayarkan. Jadi persiapannya mulai dilakukan dari sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden,” jelas Sri Mulyani.

Selain melaporkan mengenai kesiapan THR dan Gaji ke-13, Menkeu juga menyampaikan update pelaksanaan APBN 2024 kepada Presiden untuk mendapatkan terutama mengenai beberapa perubahan pos-pos belanja yang perlu dilakukan penyesuaian.

“Kalau adjustment anggaran kan seperti kemarin, beberapa pos BLT, kemudian sembako, kemudian belanja tahun lalu yang tagihannya baru masuk sekarang yang harus dibayarkan,” jelas Sri Mulyani.

Tahun ini, para ASN, termasuk TNI dan Polri akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8 persen, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

Selain itu, mereka juga akan menerima THR dan gaji ke-13 yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Namun, berapa sebenarnya besaran nominal THR dan gaji ke-13 PNS tahun 2024?

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, besaran nominal THR dan gaji ke-13 PNS tahun 2024 masih menunggu penetapan dari Presiden Jokowi. Penetapan ini diharapkan bisa dilakukan pada awal bulan

Ramadan.

“Idealnya memang di awal Ramadan kita sudah mendapatkan berapa besarnya (THR) tersebut,” kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 22 Februari 2024.

Adapun anggaran yang telah disiapkan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.077.224,9 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari lima komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja 50 persen.

Dengan demikian, besaran

nominal THR dan gaji ke-13 PNS tahun 2024 akan mengikuti kenaikan gaji pokok sebesar 8 persen.

Sebagai contoh, seorang PNS golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 3.044.300 per bulan pada tahun 2024.

Jika ditambah dengan komponen lainnya, maka total THR dan gaji ke-13 yang diterima adalah sekitar Rp 5.500.000.

Isa juga mengatakan, pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS tahun 2024 akan dilakukan 10 hari kerja sebelum Idul Fitri.

Hal ini bertujuan untuk membantu para ASN memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.

“Karena memang pembayaran untuk THR diharapkan 10 hari kerja sebelum Idul Fitri, jadi kira-kira di pertengahan Ramadan,” ujar Isa.

Dengan adanya kenaikan THR dan gaji ke-13 PNS tahun 2024, diharapkan para ASN bisa lebih sejahtera dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, kenaikan ini juga diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

ASN juga akan mendapatkan rapel kenaikan gaji 8 persen untuk Januari 2024-Februari 2024 pada Maret mendatang.

“Saya sudah cek di (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan, kami mendapat informasi di Maret (2024) nanti insyaallah gajinya sudah berdasarkan gaji yang baru (kenaikan gaji delapan persen), yang sudah ditetapkan Bapak Presiden (Jokowi),” jelas dia.

Kemenkeu mengumumkan, realisasi belanja pegawai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) naik pada awal tahun ini. Disebutkan, belanja pegawai mencapai Rp 15,3 triliun pada Januari 2024, sebelumnya pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 12,1 triliun.

“Kita lihat dari sisi jenis belanja untuk pegawai Rp 15,3 triliun. Ini meningkat dari tahun lalu yang hanya Rp 12,1 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan serupa.

Adapun rincian dari belanja pegawai Januari 2024 terdiri dari pemberian gaji dan tunjangan senilai Rp 10,3 triliun. Angka itu naik 5,1 persen dari realisasi Januari 2023 sebesar Rp 9,8 triliun.

Lalu untuk membayar tunjangan kinerja atau tukin, honorarium, serta lembur sebesar Rp 5 triliun. Realisasi ini naik sampai 117,39 persen dari Januari 2023 yang hanya sebesar Rp 2,3 triliun.

Tren belanja pegawai sendiri sejak 2020 di kisaran Rp 12 triliun. Pada Januari 2020 realisasinya sebesar Rp 12,5 triliun.

Tapi jika merujuk PP Nomor 15 Tahun 2023, berikut komponen THR yang akan diberikan.

- * Gaji pokok
- * Tunjangan keluarga
- * Tunjangan pangan
- * Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- * Tunjangan Kinerja (Tukin)
- * Tambahan penghasilan. •IRY





TIDAK ADA KECURANGAN HANYA PELANGGARAN

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengenal istilah kecurangan, melainkan pelanggaran. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.

“**D**alam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak ada namanya nomenklatur kecurangan, yang ada pelanggaran. Pelanggaran apa yang terjadi? Ada pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana terjadi,” kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Bagja menyatakan, sejauh ini belum ada temuan yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024. Di pun memastikan dalam setiap Pemilu pasti ada pelanggaran.

“Saat ini sudah ada sekitar 1.116 laporan dan 666 temuan pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Jadi bukan tidak ada pelanggaran, namanya kompetisi masa tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran ya Bawaslu nggak usah ada,” ujar Bagja.

“Ada kejadian-kejadian saat proses penghitungan dan rekapitulasi. Di undang-undang tindak pidana pun ada. Jika ada yang merubah hasil itu bisa dipidana. Jika ada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengubah hasil itu bisa dipidana. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga bersama supaya aparat penyelenggara pemilu itu juga tidak melakukan pelanggaran,” kata dia.

Bagja menegaskan Bawaslu masih menunggu hasil pemungutan suara ulang (PSU) dan temuan di lapangan untuk memastikan integritas pemilu.

“Apakah itu memengaruhi hasil? Kan ada namanya pelanggaran administrasi TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, ada beberapa kriteria yang kumulatif harus dipenuhi prasyaratnya dan satunya adalah memengaruhi hasil, misalnya,” kata Bagja.

Bagja menyebut setelah identifikasi pelanggaran, proses selanjutnya adalah pembuktian dan menerima keberatan dari pihak yang terkait. Bawaslu juga membuka pintu untuk pengaduan dan memastikan transparansi serta keberlanjutan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami dalam undang-undang, dalam peraturan perundang-undangan, ada pintu-pintu demikian yang ada,” tegasnya.

Bagja juga menanggapi usul penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir. Usulan tersebut dilayangkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Bagja mempersilakan apabila DPR akan menggulirkan hak angket berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja.

Dia menyebutkan, sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, fungsi Bawaslu hanya menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu berfokus menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi.

“Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” kata dia.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Bagja menuturkan Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran

hukum lainnya.

Selanjutnya, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Merespons pernyataan Bawaslu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Indra Charismiadi, mengatakan pihaknya juga tak punya niat membatalkan pemilu.

“Satu hal yang perlu diluruskan, Timnas AMIN juga tidak punya niat untuk membatalkan hasil pemilu. Kami sebatas menuntut pemilu yang jujur dan adil, sehingga siapapun yang terpilih punya legitimasi dari rakyat. Sebatas itu sih,” kata Indra, Sabtu, 24 Februari 2024.

Namun, Indra merespons Bawaslu sudah memutuskan di depan bahwa tidak ada temuan kecurangan yang bisa membatalkan pemilu. Menurutnya, pernyataan Bawaslu menarik.

“Menarik juga sih Bawaslu sudah membuat keputusan di depan tanpa melihat seluruh bukti secara keseluruhan yang tentunya dapat dikategorikan terstruktur, sistematis, dan masif,” ucapnya.

Meski begitu, Indra mengatakan tidak

heran dengan pernyataan Bawaslu. Dia mengatakan banyak laporan kecurangan yang memang tidak ditindak oleh Bawaslu.

“Buat kami pernyataan-pernyataan dari Bawaslu seperti tidak mengherankan sih, karena banyak sekali laporan-laporan yang tidak ditindak oleh Bawaslu sama sekali. Ini disayangkan karena kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemilu jadi jatuh,” ujar dia.

Di sisi lain, mantan Ketua Bawaslu periode 2017-2022, Abhan, menyatakan Bawaslu memiliki hak untuk melakukan investigasi guna mencari bukti yang kuat jika laporan atau aduan yang diterima dianggap belum cukup membuktikan dugaan kecurangan.

“Kalau memang laporan atau aduan ini tidak cukup bukti, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi dalam rangka untuk menguatkan mencari bukti yang kuat, ketika nanti harus memberi putusan,” ungkap dalam sebuah diskusi publik secara virtual oleh Akademi Pemilu dan Demokrasi, Minggu, 25 Februari 2024.

Abhan menambahkan, Bawaslu juga berwenang memberikan sanksi jika terbukti ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu.

“Jadi, misalnya, ada laporan soal dugaan abuse of power, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya di dalam proses pemilu, bisa juga itu menjadi bagian dari pelanggaran administratif. Maka Bawaslu tidak hanya mendasar pada bukti-bukti laporan dari pelapor, juga bisa melakukan investigasi apabila dipandang perlu untuk itu,” katanya.

Selain itu, Abhan juga menyoroti sejumlah potensi pelanggaran dalam proses rekapitulasi pemilu. Beberapa di antaranya termasuk kesulitan akses pengawas pemilu atau saksi terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Serta penundaan jadwal rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kesalahan input data perolehan pada saat rekapitulasi, ketidaksesuaian data Sirekap dengan data C hasil di TPS. Masalah lainnya adalah masih banyak pengawas TPS tidak menerima salinan model C hasil, dan kurangnya pengamanan pada kotak suara saat perpindahan antar tingkatan. ●RDO





“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar”

David Yama

INFO
KPU

Minggu IV • Februari 2024

23

PECAT KETUA DAN KOMISIONER KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, dan enam anggotanya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam dugaan pelanggaran etik.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, membenarkan Hasyim dan enam komisioner itu disidangkan atas dugaan pelanggaran etik pada Rabu, 28 Februari 2024.

Perkara dugaan pelanggaran etik ini diadukan Rico Nurfiandiyah Ali, seorang warga asal Jember, Jawa Timur, selaku Ketua Pemantau Pemilu dari Jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat di Jawa Timur. Dia mengadukan Hasyim dan anggota KPU Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Dalam aduannya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis DKPP, Rico mendalilkan Hasyim dan anggotanya tidak akuntabel dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Pada pokok-pokok aduannya, Rico yang hadir secara virtual menjelaskan bahwa pengaduannya itu didasari oleh adanya sejumlah pemberitaan di media massa pada 29 November 2023 terkait data DPT yang diretas. Dengan adanya dugaan kebocoran itu, Rico mengatakan para pihak yang teradu tersebut melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 2 huruf B serta Pasal 6 Ayat 3 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Saya patut merasa khawatir data saya juga bocor,” kata Rico.

Maka dari itu, dia meminta kepada majelis sidang DKPP memutuskan menerima pengaduan, menyatakan pihak teradu melanggar kode etik,

hingga memberikan sanksi penghentian kepada para teradu.

Dia menyebutkan data yang dibobol diunggah se-

orang yang mengklaim dugaan kebocoran data itu berupa nama, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Ia menyediakan 500 ribu data sebagai sampel.

Sampel ini juga memuat data sejumlah pemilih yang berada di luar negeri. Selain itu, disebut data tersebut dijual dengan harga 2BTC atau USD74 ribu (Rp1,14 miliar). Oleh sebab itu, dia menganggap KPU telah melanggar akuntabel dan profesionalitas.

Komisioner KPU Mochammad Afifudin yang mewakili pihak teradu menjelaskan bahwa KPU langsung melakukan mitigasi ketika menerima informasi adanya dugaan akses ilegal kepada data di aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), di antaranya melalui berkoordinasi dengan Bareskrim Polri hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“KPU telah melakukan pengecekan terhadap Sidalih dan menonaktifkan akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut,” kata Afifudin.

Sekretaris DKPP, David Yama, mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari Rico, Hasyim dan anggotanya, serta pihak dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut. Menurut David, pihaknya telah memanggil pihak yang berkaitan dengan persidangan itu sesuai Pasal 22 ayat 1 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu-

han Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata David.

Dia menjelaskan, sidang ini dijalankan secara terbuka kepada umum, baik masyarakat umum atau yang ingin melihat. DKPP juga menyiarkan sidang secara langsung melalui platform YouTube dan Facebook resmi DKPP. Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini.

Majelis sidang kode etik DKPP juga memvonis sanksi peringatan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028.

Majelis sidang menyatakan bahwa Hasyim terbukti melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2023 jo Pasal 6 Ayat 2 huruf c, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan i, Pasal 11 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Perkara dengan pengadu bernama Linda Hepy Kharisda Gea itu terdaftar dengan nomor perkara 140-PKE-DKPP/XII/2023. “Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I, Hasyim Asy'ari, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito.

Dalam keterangan resmi DKPP, perkara

tersebut diadukan oleh Linda yang memberikan kuasa kepada Roynal Christian Pasaribu, Akhmad Sururi Azis, dan Donny Ferdiansyah. Linda merupakan calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028.

Selain Hasyim, pengadu juga mengadukan dua orang lainnya ke DKPP, yakni Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin dan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara Petrus Hamonagan Panjaitan. Keduanya pun dijatuhi sanksi serupa.

Pihak pengadu mengadukan Hasyim ke DKPP karena mengganti Linda secara mendadak, sehingga gagal dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028.

Sebelumnya, nama Linda telah tercantum dalam pengumuman calon anggota KPU terpilih kabupaten dan kota yang dikeluarkan KPU. Majelis menyebut Hasyim melakukan pergantian itu karena menerima informasi bahwa Linda masih tercantum sebagai anggota partai politik.

Namun, Hasyim tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada Linda dan hanya melakukan klarifikasi ke KPU Sumatera Utara. Atas dasar itu, majelis DKPP menganggap Hasyim melakukan pelanggaran karena tidak melakukan klarifikasi secara langsung kepada Linda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU perlu melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota tim seleksi dan calon anggota KPU provinsi, kabupaten, dan kota yang diduga melakukan pelanggaran dalam seleksi.

“Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaksanakan putusan ini,” kata Heddy. ●RDO



“Seharusnya ketika suara Prabowo tinggi partai pengusung utamanya mengambil insight yang tinggi atau manfaat dari suara calonnya, tapi justru tidak. Justru yang mengalami kenaikan suara adalah Partai Golkar”

Deni Irvani



PRABOWO-GIBRAN MENANG GERINDRA DIKALAHKAN GOLKAR

Pemilihan legislatif 2024 sudah digelar pada 14 Februari lalu. Hingga Selasa, 27 Februari 2024 pukul 22.10 WIB, jumlah suara yang sudah terkumpul mencapai 65,18 persen dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) per 21.00.

Dari 18 parpol nasional, sembilan di antaranya sudah mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen dengan PDIP unggul di perhitungan asli data TPS atau real count.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam perolehan suara sementara hasil real count Pilpres 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan data hasil real count KPU hingga Selasa (27/2/2024) pukul 21.00 WIB, progres suara masuk mencapai 77,60 persen. Persentase ini merupakan akumulasi suara dari 636.859 dari total 823.236 TPS di 38 provinsi. Dari jumlah suara yang telah masuk tersebut, keunggulan Prabowo-Gibran menyentuh angka 58,84 persen atau sama dengan 75.034.997 suara.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan persentase 24,46 persen suara. Pasangan calon nomor urut 01 ini meraup 31.186.671 suara.

Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di posisi terakhir dengan perolehan 16,70 persen. Persentase tersebut setara dengan 21.299.570 suara.

Hasil real count Pemilu 2024 yang dirilis KPU juga menunjukkan PDIP masih memimpin jumlah perolehan suara sementara. Berdasarkan hasil real count pada Selasa, 27 Februari 2024 pukul 17.00 WIB, Partai Banteng meraih suara hingga 16,55 persen atau paling tinggi dibandingkan 17 partai nasional lainnya.

PDIP dibuntuti oleh Partai Golkar dengan 15,14 persen suara dan Partai Gerindra

Berikut data real count sementara KPU per 21 Februari 2024 pukul 23.00 WIB:

1. PDIP	: 16,91 persen
2. Partai Golkar	: 15,12 persen
3. Partai Gerindra	: 13,44 persen
4. PKB	: 11,82 persen
5. Partai Nasdem	: 9,4 persen
6. PKS	: 7,48 persen
7. Partai Demokrat	: 7,41 persen
8. PAN	: 6,93 persen
9. PPP	: 4,05 persen
10. PSI	: 2,54 persen
11. Partai Perindo	: 1,28 persen
12. Partai Gelora	: 0,93 persen
13. Partai Hanura	: 0,75 persen
14. Partai Buruh	: 0,61 persen
15. Partai Ummat	: 0,44 persen
16. PBB	: 0,35 persen
17. Partai Garuda	: 0,32 persen
18. PKN	: 0,23 persen

dengan 13,39 persen suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi keempat dengan 11,66 persen suara. Selanjutnya, partai nasional peserta Pemilu 2024 tercatat meraih suara di bawah 10 persen.

Mayoritas dari kelompok partai nasional itu pun hanya meraup suara di bawah 5 persen. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meraih 4,00 persen suara.

Dengan demikian, PPP terancam tidak kembali ke Senayan lantaran berpotensi gagal meraup suara di bawah 4 persen atau berada di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) Pemilu 2024 yang ditetapkan UU 7/2014 tentang Pemilihan Umum.

Se -

lain PPP, ada sembilan partai yang 'kesulitan' masuk ke Senayan karena perolehan suaranya berada di bawah 4 persen.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan penyebab perolehan suara Partai Gerindra yang tidak naik drastis pada pantauan dari situs pemilu2024.go.id, Selasa, 27 Februari 2024. Gerindra hanya mampu mengumpulkan suara 13,36 persen atau 10.107.102 suara. Padahal, partai tersebut pengusung utama pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak yaitu 58,84 persen atau 75.017.458 suara sementara versi hitungan resmi KPU.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, mengungkapkan, efek ekor jas atau dalam politik sebuah upaya memanfaatkan popularitas yang dalam konteks ini adalah Prabowo untuk menarik suara bagi partai Gerindra di pemilu 2024 tidak terlihat efeknya.

“Seharusnya ketika suara Prabowo tinggi partai pengusung utamanya mengambil insight yang tinggi atau manfaat dari suara calonnya, tapi justru tidak. Justru yang mengalami kenaikan suara adalah Partai Golkar,” katanya dalam tayangan SMRC.

Deni juga mengatakan, jika Gerindra berhasil menerapkan efek ekor jas, maka dapat memperoleh suara paling tidak setengahnya yaitu 29 persen. Namun, pada kenyataannya, hal itu tidak terjadi, sehingga suara yang didapat hanya di bawah itu.

Deni mengungkapkan, Gerindra hanya berhasil me -

raih

20 persen suara Prabowo-Gibran. Selanjutnya, memilih partai Golkar yang mencapai 18 persen dan partai Demokrat 10 persen. Jadi menurutnya, Prabowo tidak identik khusus dengan Gerindra pada pemilihan presiden atau partai politik, sehingga berbeda dengan Pemilu 2019.

“Sehingga Gerindra tidak berhasil mengidentikan partainya dengan Prabowo, memilih Prabowo itu tersebar ke mana-mana pilihannya, tiket memilihnya dibelah dua. Presidennya milih Prabowo tapi partainya bisa milih Gerindra, PDI Perjuangan, bahkan memilih Golkar,” ungkapnya.

Bahkan, menurutnya, PDIP bisa memperoleh suara yang sama dengan Partai Demokrat yaitu 10 persen dalam perolehan suara, yang mana PDIP adalah partai yang menjadi lawan politik Prabowo di Pilpres dengan mengirimkan calonnya yaitu paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Jadi memang betul-betul agak cair memilih itu antara pilihan presiden dengan pilihan partai politik, walaupun PDIP tidak mendukung Prabowo tapi ada juga 10 persen dari memilih Prabowo, tapi pada pemilihan legislatif memilihnya PDI Perjuangan,” terangnya.

Dia menambahkan, memilih paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar juga tersebar. Akan tetapi, para pemilih lebih banyak dari partai pengusung yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 24 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 20 persen, Partai Nasional Demokrat (NasDem) 18 persen, dan Partai Golkar 10 persen.

“Tapi tidak identik semisal NasDem karena partai pengusung dari dulu, ternyata tidak juga, sehingga kita tidak melihat kenaikan signifikan dibanding 2019,” katanya.

Sementara, memilih Ganjar-Mahfud mayoritas adalah pemilih PDIP pada pemilihan legislatifnya. Dari sana Ganjar-Mahfud berhasil mengumpulkan 59 persen suara dari pemilih PDIP. ●RDO

